

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA
GENERASI MUDA BANGSA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
GUNA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

Oleh:

**ENJUD DAROJAT, S.T., M.M. M.Han.
KOLONEL LAUT (E) NRP. 9861/P**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LX
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : "MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA GENERASI MUDA BANGSA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 GUNA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA".

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LX Tahun 2020 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LX di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gusti Putu Buana, S.A.P., M.Sc. dan Tim Pengudi Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan

pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Juni 2020 .

Penulis,



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enjud Darojat, S.T., M.M., M.Han.

Pangkat : Kolonel Laut (E)

Jabatan : Sahli Pang E Teklog Koarmada II

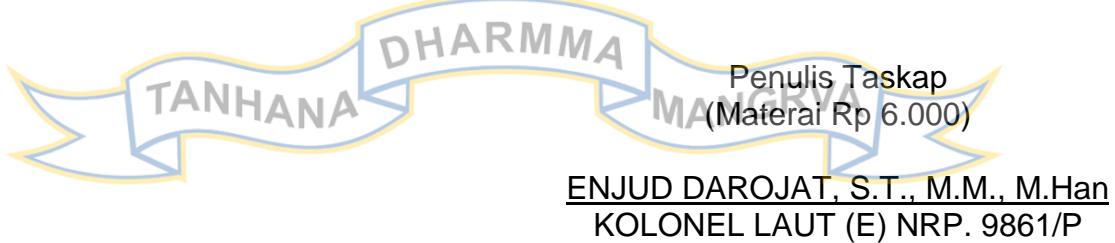
Instansi : TNI AL

Alamat : Komando Armada II Ujung Surabaya Jawa Timur

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2020



 Penulis Taskap
 (Materai Rp 6.000)
ENJUD DAROJAT, S.T., M.M., M.Han
KOLONEL LAUT (E) NRP. 9861/P

LEMBAR
DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-Undangan	10
9. Kerangka Teoretis	12
10. Data dan Fakta	17
11. Lingkungan Strategis	21
BAB III PEMBAHASAN	28
12. Umum	28
13. Kesadaran Bela Negara Ditinjau dari Unsur Cinta Tanah Air	28
14. Kesadaran Bela Negara Ditinjau dari Unsur Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	38
15. Kesadaran Bela Negara Ditinjau dari Unsur Keyakinan pada Pancasila sebagai Ideologi Negara	47
BAB IV PENUTUP	58
16. Simpulan	58
17. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

- ALUR PIKIR
- RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Nilai Indek Ketahanan Nasional Indonesia Menurut Gatra (2015–2019)



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemerdekaan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia tidaklah selesai ketika negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, melainkan harus senantiasa dijaga dan dipertahankan dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang turut berkembang seiring perkembangan zaman. Dalam konteks inilah, bela negara merupakan suatu keniscayaan yang harus ada.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), Pasal 6 Ayat (1), disebutkan bahwa “Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.” Pasal ini menunjukkan bahwa upaya bela negara melekat pada diri tiap-tiap individu warga negara, yang diwujudkan dalam praktik kehidupan sosial mereka. Secara garis besar, penyelenggaraan upaya bela negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) UU PSDN, dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi warga negara. Tiap-tiap bentuk upaya bela negara tersebut tentu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman yang semakin pesat.

Hingga kini, perkembangan peradaban manusia telah mengalami empat fase Revolusi Industri.¹ Fase pertama terjadi pada akhir abad ke-18 di Inggris, ditandai oleh penemuan mesin-mesin yang bekerja dengan tenaga uap. Fase kedua terjadi pada awal abad ke-20, ditandai oleh kemunculan teknologi berbasis tenaga listrik yang memungkinkan produksi massal barang-barang industri. Fase ketiga terjadi pada pertengahan 1970-an, ditandai oleh penggunaan perangkat elektronik dan teknologi informasi yang semakin masif. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, fase keempat pun menyusul. Fase terakhir ini dimulai pada permulaan abad ke-21, ditandai oleh penggunaan internet di berbagai bidang kehidupan serta

¹ Liao Yongxin et al, “The Impact of the Fourth Industrial Revolution: A Cross-Country/Region Comparison” (*Production* 28, 2018).

perkembangan sistem siber-fisik (*Cyber-Physical System*), yakni teknologi yang mengintegrasikan realitas fisik dengan realitas siber.²

Perubahan yang sangat cepat ini tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi pula pada upaya bela negara. Dapat dikatakan bahwa tantangan terkini yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan upaya bela negara adalah bertransformasinya masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia, akibat munculnya “Revolusi Industri 4.0.” Revolusi Industri 4.0 telah memicu perubahan mendasar di mana masyarakat industrial (*industrial society*) bertransformasi menjadi masyarakat informasi (*information society*).

Salah satu efek samping dari bertransformasinya masyarakat menjadi masyarakat informasi adalah membaurnya informasi yang sesuai kenyataan dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, bahkan berupa kebohongan (*hoax*) yang berpotensi menjerumuskan masyarakat ke dalam konflik, bahkan disintegrasi sosial. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada era Revolusi Industri 4,0 yang salah satunya ditandai dengan hadirnya berbagai macam aplikasi media sosial (*Facebook*, Instagram, Twiter, dsb.) yang berbasis jaringan internet merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh medsos dalam penyebaran informasi, menyebabkan terjadinya fenomena penyebaran berita *hoax* yang mencoba untuk memainkan isu-isu sensitif. Salah satu contoh destruktif medsos adalah terjadinya “Arab Spring” yang melahirkan gelombang demonstrasi yang berusaha menggulingkan pemerintah.³ Di saat yang bersamaan, situasi tersebut juga turut mengakibatkan pudarnya karakteristik generasi muda sebagai bangsa Indonesia.

Karakteristik kebangsaan yang cukup memprihatinkan, termasuk di kalangan generasi muda bangsa, terlihat salah satunya dari hasil Survei Nilai-Nilai Kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017.

² Lee MinHwa et al., “How to Respond to the Fourth Industrial Revolution, or the Second Information Technology Revolution? Dynamic New Combinations between Technology, Market, and Society through Open Innovation” (*Journal of Open Innovation* vol. 4, no. 21, 2018); Liao Yongxin et al., “The Impact of the Fourth Industrial Revolution: A Cross-Country/Region Comparison” (*Production* vol. 28, 2018); V. E. Satya, “Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0” (*Info Singkat* vol. X, no. 09/I/Puslit/Mei/2018); Matthias Schäfer, “The Fourth Industrial Revolution: How the EU Can Lead It” (*European View* vol. 17, no. 1, 2018). Hal. 5–12.

³ Moh Faidol Juddi, *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer*, (Bandung: Unpad Press, 2019), hlm.329

Menurut hasil survei tersebut, 18% orang Indonesia tidak mengetahui judul lagu kebangsaan Republik Indonesia, 24% orang Indonesia tidak hafal semua sila Pancasila, 53% orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan, dan 55% orang Indonesia jarang atau tidak pernah mengikuti kerja bakti di lingkungannya.⁴

Adapun menurut survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) setiap lima tahun sekali, terjadi tren penurunan pendukung Pancasila dari waktu ke waktu. Pada tahun 2005, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendukung Pancasila sebesar 86%, namun pada tahun 2010 turun menjadi 81,7% dan pada tahun 2015 hanya 75,3%.⁵ Sementara itu, pada Juni 2016 Alvara Research Center melakukan survei tentang pandangan keagamaan umat Islam di Indonesia di 15 provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa 45,4% responden masih memilih Pancasila sebagai ideologi negara, sementara 15,7% cenderung memilih Islam sebagai ideologi negara. Yang cukup memprihatinkan adalah bahwa sebanyak 38,9% sisanya termasuk ke dalam ragu-ragu antara memilih Pancasila atau Islam sebagai ideologi negara.⁶

Kelompok radikal menggunakan internet dan media sosial dengan serius dalam menyebarkan doktrinnya karena dapat menjangkau warganet secara luas. Survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah pada akhir 2017 menunjukkan adanya potensi radikalisme di kalangan generasi Z sebesar 37,71 persen.⁷ Demikian halnya dengan hasil penelitian Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2017 yang mencatat sekitar 39 persen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terpapar radikalisme.⁸ Adapun Indeks Potensi Radikalisme secara nasional menurut hasil survei yang dilaksanakan BNPT dibantu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama (Balitbang Kemenag), Lembaga Daulat

⁴ "Mantapkan Nilai Pancasila," *Kompas* (25 Juli 2017).

⁵ Mokhamad Munib, "DPR Prihatin akan Terus Turunnya Nilai-Nilai Kebangsaan," *SenayanPost.com* (29 Agustus 2018), <https://www.senayanpost.com/dpr-prihatin-akan-terus-turunnya-nilai-nilai-kebangsaan/>, diakses 21 Maret 2020.

⁶ Hasanuddin Ali, "Ideologi Negara: Pancasila atau Islam?" *Alvara-Strategic.com* (10 January 2018).

⁷ Redaksi NU Online, "Radikalisme Yang Menyebar Secara Senyap Pada Remaja dan Pemuda," <https://www.nu.or.id/post/read/90645/radikalisme-yang-menyebar-sekara-senyap-pada-remaja-dan-pemuda>, diakses 21 Maret 2020

⁸ Wishnugroho Akbar, "BIN Ungkap 39 % Mahasiswa Terpapar Radikalisme", dalam <https://www.cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 21 Maret 2020.

Bangsa dan lainnya yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, untuk tahun 2019 mencapai 38,43 persen.⁹

Beberapa survei di atas, meskipun hanya memotret sebagian aspek dari kondisi bela negara masyarakat Indonesia dewasa ini, namun tetap dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa kesadaran bela negara masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda bangsa, dapat dikatakan masih rendah dan perlu ditingkatkan. Hal ini perlu diwaspadai, karena menurunnya kesadaran bela negara generasi muda akan menyebabkan melemahnya kewaspadaan nasional sehingga ketahanan nasional pun menjadi kurang tangguh.¹⁰ Jika kondisi demikian sampai dibiarkan, maka segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang seharusnya dapat diatasi, akan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman yang harus diwaspadai baik ancaman militer, maupun non militer (ideologi, politik, ekonomi sosial-budaya dan sumber kekayaan alam). Sebagai contoh, paham radikalisme yang menyebar melalui jaringan kelompok Islam transnasional tertentu, seperti Hizbut Tahrir, akan dengan mudah berkembang di kalangan generasi muda dan mengancam kesatuan bangsa yang didasarkan pada kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, termasuk di dalamnya kemajemukan beragama. Oleh karena itu, pembangunan karakter generasi muda bangsa perlu segera dilakukan untuk meningkatkan kembali kesadaran bela negara mereka. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, pembangunan karakter ini harus dijawi oleh konsensus dasar bangsa Indonesia, yang tercakup dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berpijak kepada keempat konsensus dasar ini, pembangunan karakter generasi muda bangsa diharapkan akan dapat mengembalikan kepribadian mereka sebagai bangsa Indonesia.

Berdasarkan situasi yang telah dijelaskan di atas, perlu kiranya sedini mungkin kita melakukan mitigasi terhadap kondisi kesadaran bela negara generasi muda bangsa di tengah situasi kemasyarakatan yang bergulir dan berubah dengan sangat

⁹ Lisye Sri Rahayu, "BNPT Bikin Survei, Hasilnya Potensi Radikalisme Menurun Tahun Ini," Detik.com (10 Desember 2019).

¹⁰ I Nengah Suriata, "Aktualisasi Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Muda dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* Vol. 4 No. 1 (2019), hal. 48.

cepat karena konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0. Hal inilah yang menjadi awal ketertarikan penulis untuk melakukan pengkajian guna mengetahui dan kemudian meningkatkan kesadaran bela negara generasi muda bangsa dalam konteks Revolusi Industri 4.0. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulisan Taskap ini mengambil judul "**Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Generasi Muda Bangsa pada Era Revolusi Industri 4.0 Guna Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa.**"

2. Perumusan Masalah

Mencermati situasi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang beserta persoalan-persoalan yang melingkupinya, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan pengkajian yang hendak dianalisis di dalam Taskap ini. Permasalahan pengkajian tersebut adalah "**bagaimana meningkatkan kesadaran bela negara generasi muda bangsa pada era Revolusi Industri 4.0 guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa?**"

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kesadaran bela negara generasi muda bangsa di era Revolusi Industri 4.0 ditinjau dari aspek cinta tanah air?
- b. Bagaimana kesadaran bela negara generasi muda bangsa di era Revolusi Industri 4.0 ditinjau dari aspek kesadaran berbangsa dan bernegara?
- c. Bagaimana kesadaran bela negara generasi muda bangsa di era Revolusi Industri 4.0 ditinjau dari aspek keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis, serta merumuskan pemecahan atas permasalahan yang diangkat, yakni bagaimana meningkatkan kesadaran bela negara generasi

muda bangsa dalam konteks kehidupan di era Revolusi Industri 4.0 guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara generasi muda bangsa di era Revolusi Industri 4.0 ini guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan kertas karya ilmiah ini dibatasi pada generasi muda bangsa dan unsur bela negara. Yang dimaksud dengan generasi muda bangsa, dalam konteks penulisan Taskap ini, adalah para pemuda, yakni warga negara Indonesia yang mencakup generasi Y (milenial) dan sebagian generasi Z yang lahir antara tahun 1995–2005. Adapun terkait nilai bela negara, pembahasan dalam Taskap ini dibatasi pada tiga dari lima nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga unsur ini dipilih karena berkenaan langsung dengan konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Jika ketiga unsur ini lemah, maka dapat diasumsikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa juga melemah.

b. Sistematika

Bagian utama dari penulisan Taskap ini terdiri atas empat bab, dengan tata urut sebagai berikut. Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta pengertian konsep-konsep utama yang akan dibahas. Bab II merupakan tinjauan pustaka yang menyajikan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan terkait topik kajian, kerangka teoretis yang digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan

penelitian, data dan fakta yang relevan dengan persoalan yang diangkat, serta lingkungan strategis yang melingkupi persoalan tersebut. Bab III merupakan bab pembahasan terhadap tiga unsur bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara, untuk dapat ditemukan akar masalah dari rendahnya kesadaran bela negara generasi muda bangsa dan dirumuskan cara mengatasinya. Bab IV merupakan penutup yang meliputi simpulan dan rekomendasi.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan taskap ini berupa metode deskriptif kualitatif berdasarkan analisis logika sebab-akibat secara holistik, komprehensif, dan integral. Dengan metode deskriptif analitik, penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk menyajikan gambaran dan analisis yang mendalam tentang suatu fenomena—dalam hal ini, kesadaran bela negara generasi muda pada era Revolusi Industri 4.0—sehingga dapat dibangun pemahaman mengenai fenomena tersebut berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam hal ini analisisnya bersifat kualitatif, yakni dimaksudkan bukan untuk melakukan pengukuran, melainkan untuk membangun pemahaman mengenai hubungan-hubungan di antara beberapa konsep yang saling terkait.

b. Pendekatan

Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional. Adapun analisisnya sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian

Beberapa istilah penting menjadi konsep-konsep utama untuk dibahas di dalam Taskap ini. Berikut penjelasan mengenai pengertian dari tiap-tiap istilah tersebut:

a. Kesadaran Bela Negara

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), Pasal 1 angka 11, “Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.”¹¹

b. Generasi Muda Bangsa

Ditinjau dari teori generasi, kelompok pemuda ini mencakup generasi Y (milenial) dan sebagian generasi Z yang lahir antara tahun 1995–2005. Karakteristik dan gaya hidup para pemuda dari kedua generasi ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang dihasilkan dari Revolusi Industri 4.0.

c. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 adalah fase keempat dari Revolusi Industri yang telah dialami oleh umat manusia, dimulai pada permulaan abad ke-21, dan ditandai oleh perkembangan tahap lanjut dari teknologi internet yang memunculkan sistem siber-fisik (*Cyber-Physical System*), yakni sistem teknologi yang mengintegrasikan realitas fisik dengan realitas siber.¹²

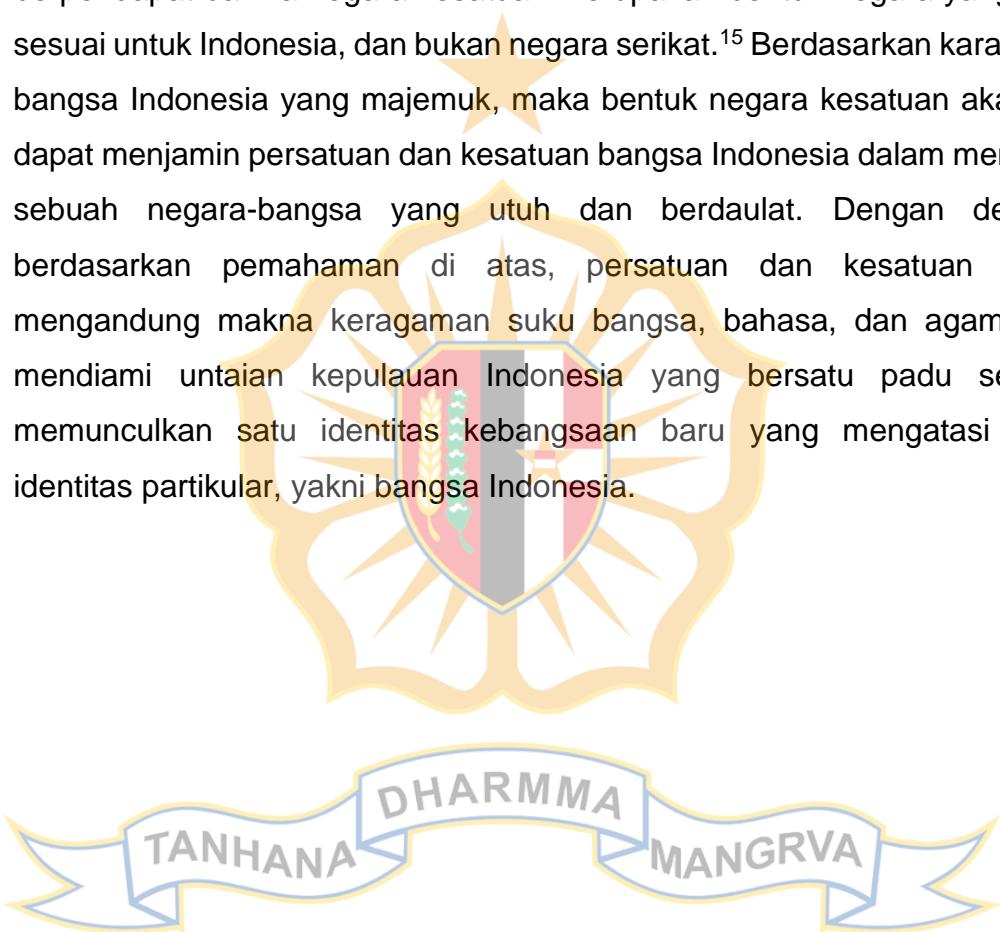
d. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Secara leksikal, persatuan diartikan sebagai “gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu,” sementara

¹¹ UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), Pasal 1 angka 11.

¹² Lee MinHwa et al., “How to Respond to the Fourth Industrial Revolution, or the Second Information Technology Revolution? Dynamic New Combinations between Technology, Market, and Society through Open Innovation” (*Journal of Open Innovation* vol. 4, no. 21, 2018); Liao Yongxin et al., “The Impact of the Fourth Industrial Revolution: A Cross-Country/Region Comparison” (*Production* vol. 28, 2018); V. E. Satya, “Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0” (*Info Singkat* vol. X, no. 09/I/Puslit/Mei/2018); Matthias Schäfer, “The Fourth Industrial Revolution: How the EU Can Lead It” (*European View* vol. 17, no. 1, 2018). Hal. 5–12.

kesatuan diartikan sebagai “keesaan” atau “sifat tunggal.”¹³ Adapun secara historis, gagasan tentang Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang berpijak pada persatuan seluruh bangsa Indonesia, dan bukan negara federasi, telah diutarakan oleh para tokoh nasional dan Bapak Bangsa (*Founding Fathers*). Mr. Soepomo, pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, mengemukakan bahwa negara Indonesia harus dibangun berdasarkan bentuk “negara yang integralistik.”¹⁴ Demikian halnya Mr. Muhammad Yamin, berpendapat bahwa negara kesatuan merupakan bentuk negara yang paling sesuai untuk Indonesia, dan bukan negara serikat.¹⁵ Berdasarkan karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk, maka bentuk negara kesatuan akan lebih dapat menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mendirikan sebuah negara-bangsa yang utuh dan berdaulat. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman di atas, persatuan dan kesatuan bangsa mengandung makna keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama yang mendiami untaian kepulauan Indonesia yang bersatu padu sehingga memunculkan satu identitas kebangsaan baru yang mengatasi semua identitas partikular, yakni bangsa Indonesia.



¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, 2016).

¹⁴ Lemhannas RI, *Modul Bidang Studi Konsensus Dasar Bangsa: Sub Bidang Studi NKRI* (Jakarta: Lemhannas RI, 2020), hal. 89.

¹⁵ *Ibid.*, Lemhannas RI, hal. 89.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Bab ini berisikan pembahasan mengenai berbagai literatur dan dokumen rujukan yang digunakan untuk menganalisis topik pengkajian, yakni meningkatkan kesadaran bela negara generasi muda bangsa pada era Revolusi Industri 4.0 guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Rujukan-rujukan tersebut terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bela negara maupun persatuan dan kesatuan bangsa; berbagai uraian teoretis menyangkut konsep-konsep yang digunakan sebagai alat analisis; berbagai data dan fakta yang menggambarkan kondisi-kondisi terkait yang relevan dengan topik penelitian; serta uraian singkat mengenai lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap permasalahan yang diangkat.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Adapun Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” (ayat 1)

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Di Indonesia, upaya pertahanan negara telah diatur secara terperinci di dalam undang-undang, yakni UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan usaha pertahanan negara. Beberapa pasal yang relevan dalam penulisan Taskap ini di antaranya adalah Pasal 2, 4, dan 5.

Pasal 2 menyebutkan bahwa:

“Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggarannya didasarkan pada kesadaran atas

hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.”

Pasal 4 menyebutkan bahwa:

“Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.”

Pasal 5 menyebutkan bahwa:

“Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.”

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN)

UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) disahkan pada tanggal 24 Oktober 2019. UU ini merupakan hasil penggabungan dan simplifikasi dari tiga rancangan undang-undang (RUU) yang terkait dengan upaya pertahanan negara, yakni RUU Komponen Cadangan, RUU Komponen Pendukung, dan RUU Bela Negara. UU PSDN memberikan definisi bela negara dan pembinaan kesadaran bela negara di dalam Pasal 1.

Pasal 1 angka 11 dan 12 menyebutkan bahwa:

“Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijewali oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.” (Pasal 1 angka 11)

“Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.” (Pasal 1 angka 12)

Secara lebih rinci, ketentuan-ketentuan terkait dengan bela negara dijelaskan pada Bab III Bela Negara yang mencakup Pasal 6–16 di dalam UU

PSDN. Beberapa pasal yang patut mendapat perhatian khusus dalam konteks penulisan Taskap ini di antaranya Pasal 6 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.” (ayat 1)

“Keikutsertaan Warga Negara dalam usaha Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. pengabdian sesuai dengan profesi.” (ayat 2)

Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa:

“Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar Bela Negara.” (ayat 1)

“Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lingkup:

- a. pendidikan;
- b. masyarakat; dan
- c. pekerjaan.” (ayat 2)

“Nilai dasar Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. cinta tanah air;
- b. sadar berbangsa dan bernegara;
- c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;
- d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
- e. kemampuan awal Bela Negara.” (ayat 3)

9. Kerangka Teoretis

a. Konsep Bela Negara

Sebagaimana telah disebutkan pada subbab sebelumnya, di dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), Pasal 1 angka 11, bela negara didefinisikan sebagai “tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijewali oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.” Secara konseptual, bela negara memiliki lima unsur atau nilai, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kesiapan awal bela negara.¹

Dalam konteks penulisan Taskap ini, hanya tiga nilai pertama yang akan digunakan, mengingat keterbatasan ruang. Nilai pertama, cinta tanah air, terkait dengan pemahaman tanah air sebagai ruang wilayah negara baik secara fisik (geografis) maupun nonfisik (tata nilai dan tata kehidupan masyarakat). Nilai kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, merupakan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Nilai ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, meliputi keyakinan dan kesadaran bahwa Pancasila adalah ideologi negara, sumber hukum dan kerangka acuan NKRI, serta bahwa nilai-nilainya dapat dipergunakan dalam penyelesaian konflik.

b. Teori Generasi

Sejak munculnya Teori Generasi (*Generation Theory*) telah diperkenalkan istilah generasi *Baby Boomer*, X, Y, Z dan *Alpha*. Secara sederhana, generasi *Baby Boomers* adalah generasi yang lahir antara tahun 1946–1960. Generasi ini disebut *Baby Boomers* karena kemunculannya ditandai dengan peningkatan drastis jumlah kelahiran pasca-Perang Dunia II. Generasi X lahir antara tahun 1961–1980. Generasi Y lahir antara tahun 1981–1994. Generasi Y juga kerap disebut sebagai generasi milenial. Mereka terlahir sebelum masifnya penggunaan internet, namun cukup akrab dengan teknologi informasi karena tumbuh dewasa di saat internet sudah marak digunakan. Generasi Z lahir antara tahun 1995–2010. Dibandingkan dengan generasi Y atau milenial, mereka memiliki ketergantungan yang jauh lebih besar terhadap internet, khususnya media sosial. Adapun generasi *Alpha* lahir

¹ Kemhan RI, *Tataran Dasar Bela Negara* (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2010).

antara tahun 2010 hingga sekarang. Dalam konteks penulisan Taskap ini, yang dimaksud dengan generasi muda bangsa mencakup generasi Y (milenial) dan sebagian generasi Z, yakni generasi Z yang lahir antara tahun 1995–2000. Karakteristik dan gaya hidup mereka sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang dihasilkan dari Revolusi Industri 4.0.

c. Konsep Revolusi Industri

Hingga kini, manusia telah mengalami empat fase Revolusi Industri.² Fase pertama terjadi pada akhir abad ke-18 di Inggris, ditandai oleh penemuan mesin-mesin yang bekerja dengan tenaga uap. Fase kedua terjadi pada awal abad ke-20, ditandai oleh kemunculan teknologi berbasis tenaga listrik yang memungkinkan produksi massal barang-barang industri. Fase ketiga terjadi pada pertengahan 1970-an, ditandai oleh penggunaan perangkat elektronik dan teknologi informasi yang semakin masif. Fase keempat dimulai pada permulaan abad ke-21, ditandai oleh penggunaan internet di berbagai bidang kehidupan serta perkembangan sistem siber-fisik (*Cyber-Physical System*), yakni teknologi yang mengintegrasikan realitas fisik dengan realitas siber.³ Dapat dikatakan bahwa tantangan bagi penyelenggaraan upaya bela negara pada era Revolusi Industri 4.0 adalah bertransformasinya masyarakat dunia, termasuk Indonesia, dari masyarakat industrial (*industrial society*) menjadi masyarakat informasi (*information society*) dan semakin dominannya ekonomi digital (*digital economy*), di mana data memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga dinamika lingkungan strategis di tataran internasional maupun nasional sangat dipengaruhi oleh penguasaan atas data melalui teknologi informasi dan komunikasi.⁴

² Liao Yongxin et al., “The Impact of the Fourth Industrial Revolution: A Cross-Country/Region Comparison” (*Production* 28, 2018).

³ Lee MinHwa et al., “How to Respond to the Fourth Industrial Revolution, or the Second Information Technology Revolution? Dynamic New Combinations between Technology, Market, and Society through Open Innovation” (*Journal of Open Innovation* vol. 4, no. 21, 2018); Liao Yongxin et al., “The Impact of the Fourth Industrial Revolution: A Cross-Country/Region Comparison” (*Production* vol. 28, 2018); V. E. Satya, “Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0” (*Info Singkat* vol. X, no. 09/I/Puslit/Mei/2018); Matthias Schäfer, “The Fourth Industrial Revolution: How the EU Can Lead It” (*European View* vol. 17, no. 1, 2018). Hal. 5–12.

⁴ German Initiative Curbing Corporate Power, “the Power of Corporations in the Digital World,” *Discussion Paper* (Berlin: German Initiative Curbing Corporate Power, 2019), hal. 4.

d. Konsep Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Republik Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan negara federasi, yang berpijak pada persatuan seluruh bangsa Indonesia.⁵ Pilihan bentuk negara kesatuan didasarkan pada pemahaman bahwa bangsa Indonesia terdiri atas penduduk yang sangat majemuk dan menyebar di seluruh kepulauan Indonesia.⁶ Persatuan dan kesatuan bangsa tidaklah terpisahkan satu sama lain. Persatuan berarti “gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu,” sementara kesatuan berarti “perihal satu; keesaan; sifat tunggal.”⁷ Dengan demikian, persatuan dan kesatuan bangsa mengandung makna keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama yang mendiami untaian kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang bersatu padu sehingga memunculkan satu identitas kebangsaan baru yang mengatasi semua identitas partikular, yakni bangsa Indonesia.

e. Teori Pembangunan Karakter

Salah satu program prioritas pembangunan nasional adalah pembangunan karakter, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan karakter sebagai sarana utamanya. Adapun pendidikan karakter, di dalam *Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010–2025*, diartikan sebagai “usaha sadar dan direncanakan untuk mewujudkan suasana, serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik dan baik sebagai warga negara.” Dalam membangun karakter bangsa, program-program pendidikan karakter harus dapat menginternalisasikan empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks

⁵ Lemhannas RI, *Modul Bidang Studi Konsensus Dasar Bangsa: Sub Bidang Studi NKRI* (Jakarta: Lemhannas RI, 2020), hal. 15.

⁶ *Ibid.*, Lemhannas RI, hal. 89.

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V* (Jakarta: Badan Bahasa Kemdikbud RI, 2016).

penulisan Taskap ini, teori pembangunan karakter akan digunakan untuk merumuskan upaya peningkatan kesadaran bela negara generasi muda.

f. Teori *Branding*

Untuk dapat meraih kesuksesan program bela negara, adalah penting untuk tetap menarik perhatian (*attention*) warga negara bahwa konsep bela negara itu menarik, penting dan perlu.⁸ Untuk itu, teori *branding* relevan untuk menganalisis bagaimana program bela negara dapat diterima di kalangan generasi muda bangsa. Terkait teori *branding*, David A. Aaker mengemukakan pentingnya ekuitas merek (*brand equity*),⁹ yang utamanya terdiri atas empat macam aset. Pertama, loyalitas merek (*brand loyalty*) terkait erat dengan kesetiaan konsumen terhadap suatu merek, sehingga akan cenderung untuk memilih dan memprioritaskannya dibandingkan merek-merek lain. Kedua, kesadaran akan merek (*brand name awareness*) terkait erat dengan kesan akrab (*familier*) yang dipersepsi oleh konsumen atas suatu merek. Ketiga, kualitas yang tampak (*perceived brand quality*), merupakan kualitas yang dapat langsung tertangkap oleh konsumen. Keempat, asosiasi merek (*brand associations*) kerap diidentikkan dengan imaji merek (*brand image*), yakni kesan atau nilai tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek sebagai unsur pembeda yang membuatnya nampak khas. Dengan menganalogikan generasi muda sebagai calon konsumen, maka program bela negara perlu juga memiliki ekuitas merek agar dapat diterima di kalangan generasi muda. Dalam konteks penulisan Taskap ini, teori *branding* akan digunakan untuk merumuskan upaya memasyarakatkan program bela negara agar dapat diterima oleh kalangan generasi muda.

g. Teori U

Teori U yang diperkenalkan oleh Otto Scharmer menjelaskan sebuah proses transformasional pada individu maupun organisasi yang disebut sebagai “proses U” (*U process*). Proses U sendiri terdiri atas bagian awal, di

⁸ Prisca Delima, “Bela Negara dan Ketahanan Lingkungan Indonesia,” *Wira Edisi Khusus 2017* (Jakarta: Kemhan RI), hal. 53.

⁹ David A. Aaker, “The Value of Brand Equity,” *Journal of Business Strategy* Vol. 12 No. 4 (1992), hal. 27–32.

mana pihak-pihak yang terlibat membangun maksud bersama dan meninggalkan hal-hal yang tidak esensial (*letting go*). Bagian selanjutnya merupakan proses di mana semua pihak yang terlibat bersama-sama mewujudkan masa depan yang diinginkan dengan membuka diri pada potensi tertinggi yang dimiliki (*letting come*). Di antara kedua fase ini terdapat inti dari Teori U yang disebut sebagai “*presencing*,”¹⁰ yakni keterhubungan dengan sumber inspirasi dan kehendak bersama yang ada di dalam diri/organisasi. Proses ini juga penting dalam upaya mengefektifkan kolaborasi di antara berbagai aktor untuk mewujudkan suatu transformasi.

10. Data dan Fakta

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya melihat perkembangan kesadaran bela negara dari waktu ke waktu adalah ketiadaan instrumen yang baku dan sudah diterima untuk mengukur kondisi kesadaran bela negara. Sebagai sebuah konsep, upaya pengukuran bela negara memang tidak mudah. Tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI (Balitbang Kemhan RI), sejak tahun 2016 telah berupaya mengembangkan Indeks Bela Negara untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi kesadaran bela negara.¹¹ Akan tetapi, hingga saat ini indeks tersebut masih dalam pengembangan. Oleh karena itu, penulis menilik beberapa survei dan data mengenai kejadian-kejadian yang dapat menggambarkan kondisi bela negara saat ini.

a. Kondisi Kesadaran Bela Negara

Berbagai survei telah dilakukan oleh beberapa lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga dari kalangan masyarakat sipil, untuk mendapatkan gambaran yang terukur tentang berbagai aspek yang terkait dengan bela negara, khususnya pada nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan Taskap ini. Pada tahun

¹⁰ O. Scharmer, “Addressing the Blind Spot of Our Time: An Executive Summary of the New Book by Otto Scharmer *Theory U: Leading from the Future as It Emerges*,” OttoScharmer.com, diunduh dari <https://www.ottoscharmer.com/publications/executive-summaries>, pada 16 Juli 2020.

¹¹ Balitbang Kemhan RI, “Litbang Penyelenggaraan PKBN di Daerah,” *Laporan Penelitian* (Jakarta: Balitbang Kemhan RI, 2019).

2017, sebagaimana telah disinggung di dalam Bab I, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan Survei Nilai-Nilai Kebangsaan. Menurut hasil survei tersebut, 18% orang Indonesia tidak mengetahui judul lagu kebangsaan Republik Indonesia, 24% orang Indonesia tidak hafal semua sila Pancasila, 53% orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan, dan 55% orang Indonesia jarang atau tidak pernah mengikuti kerja bakti di lingkungannya.¹² Terkait dengan hal ini, cukup banyak juga dijumpai kejadian-kejadian di mana generasi muda tidak hafal Pancasila maupun lirik lagu “Indonesia Raya,” seperti yang terjadi di kalangan pelajar di Jawa Timur yang kedapatan bolos sekolah pada awal 2020.¹³

Selanjutnya, pada acara halal bi halal dengan jajaran pimpinan Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, pada 19 Juni 2019, mantan Menhan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan keprihatinannya bahwa sebanyak 3% prajurit TNI terpapar radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi Pancasila; demikian halnya dengan 18,1% pegawai swasta, 19,4% PNS, dan 19,1% pegawai BUMN mengaku tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Selain itu, sebanyak 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA lebih menyukui khilafah.¹⁴ Data serupa juga dikemukakan oleh Sekjen Kementerian Kominfo, Rosarita N. Widiastuti, yang menyebutkan sekitar 19,4% (kurang lebih 800.000 orang) ASN di seluruh kementerian dan lembaga terindikasi mendukung paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berinisiatif merilis portal *AduanASN.id* untuk melaporkan ASN yang diduga terpapar radikalisme dan anti-Pancasila.¹⁵

¹² “Mantapkan Nilai Pancasila,” *Kompas* (25 Juli 2017).

¹³ “Pelajar Bolos Dihukum Menyanyikan Indonesia Raya, Ternyata Tak Ada yang Hafal,” *JPNN.com* (15 Januari 2020), diakses dari <https://www.jpnn.com/news/pelajar-bolos-dihukum-menyanyi-indonesia-raya-ternyata-tak-ada-yang-hafal>; “Dihukum Nyanyi Lagu Wajib dan Sebutkan Nama Pahlawan, Sebagian Pelajar Tak Hafal,” *NusaDaily.com* (20 Februari 2020), diakses dari <https://nusadaily.com/jatim/dihukum-nyanyi-lagu-wajib-dan-sebutkan-nama-pahlawan-sebagian-pelajar-tak-hafal.html>.

¹⁴ “BPIP-TNI Pulihkan Prajurit Terpapar Paham Anti-Pancasila,” *Beritasatu.com* (23 Oktober 2019), diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/581382-bpiptni-pulihkan-prajurit-terpapar-paham-antipancasila>, 10 Juni 2020.

¹⁵ “800.000 PNS Anti_Pancasila dan Anti-NKRI,” *Solopos.com* (29 November 2019), diakses dari <https://www.solopos.com/800-000-pns-anti-pancasila-dan-anti-nkri-1033743>, 10 Juni 2020.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan survei setiap setiap lima tahun sekali untuk melihat perkembangan kondisi kebangsaan di Indonesia. Menurut hasil survei LSI, terjadi tren penurunan pendukung Pancasila dari waktu ke waktu. Pada tahun 2005, hasil survei menunjukkan bahwa jumlah pendukung Pancasila sebesar 86%, namun pada tahun 2010 turun menjadi 81,7% dan pada tahun 2015 hanya 75,3%.¹⁶ Adapun untuk 2020, survei tersebut belum dilaksanakan. Alvara Research Center, sebuah lembaga riset lain, juga melakukan survei tentang pandangan keagamaan umat Islam di Indonesia di 15 provinsi. Hasil dari survei yang dilaksanakan pada Juni 2016 ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang secara yakin memilih Pancasila sebagai ideologi negara tidak sampai separuh dari jumlah sampel. Hanya sebanyak 45,4% responden yang masih memilih Pancasila sebagai ideologi negara, sebanyak 15,7% cenderung memilih Islam sebagai ideologi negara, sedangkan sebanyak 38,9% sisanya tergolong ragu-ragu antara memilih Pancasila atau Islam sebagai ideologi negara.¹⁷

Data yang menunjukkan menurunnya kesadaran bela negara di atas berkembang beriringan dengan munculnya fenomena-fenomena di mana sebagian masyarakat mengalami “kekecewaan,” seperti yang terjadi pada sepuluh desa di Kalimantan Timur yang pada 2016 menyatakan ingin bergabung dengan Malaysia,¹⁸ serta fenomena berkembangnya paham anti-Pancasila, misalnya yang terjadi pada Mei 2020, di Kupang, NTT, di mana beredar selebaran tentang paham khilafah yang diselipkan di dalam koran.¹⁹ Kendati demikian, semakin banyak pula inisiatif-inisiatif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang datang dari berbagai kalangan, seperti rekor pembacaan teks Pancasila serentak oleh 37.449 orang di Boyolali, Jateng,

¹⁶ Mokhamad Munib, “DPR Prihatin akan Terus Turunnya Nilai-Nilai Kebangsaan,” *SenayanPost.com* (29 Agustus 2018), <https://www.senayanpost.com/dpr-prihatin-akan-terus-turunnya-nilai-nilai-kebangsaan/>, diakses 21 Maret 2020.

¹⁷ Hasanuddin Ali, “Ideologi Negara: Pancasila atau Islam?” *Alvara-Strategic.com* (10 January 2018).

¹⁸ Putri Artika R., “Gubernur Kaltim Lapor Jokowi Ada 10 Desa Mau Gabung Malaysia,” *Merdeka.com* (15 April 2015), diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-kaltim-lapor-jokowi-ada-10-desa-mau-gabung-malaysia.html> pada 8 Mei 2020.

¹⁹ Ananias Petrus, “Selebaran Paham Khilafah Diedarkan Melalui Koran, Pasutri di Kupang Diamankan Polisi,” *Merdeka.com* (30 Mei 2020), diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/selebaran-paham-khilafah-diedarkan-melalui-koran-pasutri-di-kupang-diamankan-polisi.html>, 10 Juni 2020.

pada 25 Agustus 2019,²⁰ serta rekor *yel-yel* dan pantomim bertemakan “Pancasila Jiwa Kita” oleh 8.639 mahasiswa UNS sebagai bagian dari kegiatan Sosialisasi Aksi Kebangsaan Mahasiswa UNS pada 18 Agustus 2019 di Surakarta, Jateng.²¹

b. Indeks Ketahanan Nasional

Untuk mengetahui tingkat ketahanan nasional di Indonesia, Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI melakukan pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) setiap tahun. Pengukuran IKN dilakukan dengan mengukur ketahanan nasional masing-masing gatra dari *Asta Gatra* baik di tingkat provinsi maupun nasional. Nilai IKN berkisar antara 1–5, di mana nilai 1 mengindikasikan bahwa ketahanan nasional dalam kondisi rawan, sementara 5 sangat tangguh. Hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) selama lima tahun terakhir (2015–2019) dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Nilai IKN Indonesia Menurut Gatra (2015–2019)

GATRA	TH 2015	THN 2016	THN 2017	Tahun 2018	Maret 2019
GEOGRAFI	2,41	2,68	2,56	2,73	2,71
DEMOGRAFI	2,83	2,96	3,18	3,32	3,32
SUMBER KEKAYAAN ALAM	2,77	2,56	2,58	2,78	2,78
IDEOLOGI	2,23	2,06	2,06	2,44	2,44
POLITIK	2,39	2,43	2,43	2,67	2,67
EKONOMI	2,63	2,73	2,76	2,86	2,86
SOSIAL BUDAYA	2,20	2,14	2,16	2,30	2,30
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	2,82	3,08	3,08	2,79	2,75
INDEKS KETAHANAN NASIONAL	2,55	2,60	2,63	2,69	2,69

Keterangan:

warna kuning: kurang tangguh
warna hijau: cukup tangguh

²⁰ Ragil Ajiyanto, “Bikin Merinding, 37.449 Orang Serempak Baca Teks Pancasila di Boyolali,” *Detik.com* (25 Agustus 2019), diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4679974/bikin-merinding-37449-orang-serempak-baca-teks-pancasila-di-boyolali>, 10 Juni 2020.

²¹ Citra Larasati, “Student Vaganza’ UNS Raih Rekor Indonesia Leprid,” *Medcom.id* (17 Agustus 2019), diakses dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/MkMVD4mK-student-vaganza-uns-raih-rekor-indonesia-leprid>, 10 Juni 2020.

Sumber: Labkurtannas Lemhannas RI (2019).²²

Tabel di atas memperlihatkan tren peningkatan pada nilai IKN secara nasional dalam lima tahun terakhir, yakni sejak tahun 2015–2019, baik secara keseluruhan maupun pada masing-masing gatra. Nilai IKN terakhir pada tahun 2019 sebesar 2,69 berada pada kategori “cukup tangguh.” Namun demikian, terdapat dua gatra yang selama lima tahun terakhir selalu berada pada kategori “kurang tangguh,” yakni gatra ideologi (2,44) dan sosial budaya (2,30). Kedua gatra ini erat kaitannya dengan nilai-nilai bela negara, sehingga rendahnya nilai IKN untuk gatra ideologi dan sosial budaya juga mengindikasikan rendahnya kesadaran bela negara.

11. Lingkungan Strategis

Dinamika dalam konteks lingkungan strategis global, regional, maupun nasional berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesadaran bela negara generasi muda bangsa Indonesia. Untuk lingkungan strategis di tataran global dan regional, penjelasannya akan diorganisasi berdasarkan kriteria peluang dan ancaman. Adapun untuk lingkungan strategis nasional, penjelasannya akan diorganisasi berdasarkan kriteria kekuatan dan kelemahan. Berikut akan dijelaskan konteks lingkungan strategis di ketiga tataran tersebut.

a. Lingkungan Strategis Global

Selain isu radikalisme dan terorisme global yang selama beberapa tahun terakhir terus terjadi, isu kerusakan lingkungan dan pemanasan global (*global warming*) juga kian menjadi perhatian dunia. Bukan hanya skala global, namun dampak yang ditimbulkannya juga terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Di luar bidang kelestarian lingkungan, bidang ekonomi termasuk yang terdampak oleh fenomena pemanasan global. Di satu sisi, berbagai sumber penghidupan masyarakat yang mengandalkan kekayaan alam, misalnya pada masyarakat pesisir dan nelayan, terdampak langsung oleh rusaknya ekosistem pantai dan laut. Di sisi lain, perekonomian berbasis

²² Dadan U. Daihani, “Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS,” Paparan disampaikan pada *Lokakarya Bela Negara Wantannas RI*, 2019.

industri juga dituntut untuk melakukan perubahan mendasar menuju praktik industrial yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam kondisi semacam ini, kerja sama internasional pun memperoleh momentum karena adanya kesamaan kepentingan untuk mengatasi kerusakan lingkungan, baik kerja sama di antara aktor-aktor negara maupun aktor-aktor masyarakat sipil seperti NGO dan kelompok-kelompok pemerhati lingkungan. Kecenderungan untuk memajukan kerja sama di bidang lingkungan ini merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan lingkungan hidup di tanah air Indonesia. Dengan demikian, secara tidak langsung, kerja sama semacam ini merupakan peluang untuk merealisasikan program-program yang mencerminkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia.

Selanjutnya, seperti yang telah digambarkan di atas, kerusakan lingkungan dan pemanasan global sendiri merupakan ancaman nyata terhadap tanah air Indonesia. Cara hidup manusia modern merupakan salah satu faktor penyebab utamanya. Misalnya, kegiatan ekonomi industrial yang cenderung mengeksplorasi sumber kekayaan alam, khususnya pada sektor ekstraktif yang menjadi kontributor utama perekonomian di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Keuntungan ekonomi yang melenakan merupakan salah satu penyebab sulitnya mengubah praktik ekonomi industrial yang telah berjalan berpuluhan tahun ini, kendatipun telah terbukti dampak negatifnya (kelestarian lingkungan) akan dirasakan hingga beberapa generasi mendatang. Dengan demikian, kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia bukan hanya mengancam tanah air fisik Indonesia, tetapi juga mengancam kecintaan bangsa Indonesia terhadap tanah airnya karena godaan keuntungan ekonomi jangka pendek.

b. Lingkungan Strategis Regional

Asia Tenggara merupakan “lingkungan ketetanggaan” terdekat bagi bangsa Indonesia. Selama ini Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara di Asia Tenggara, serta negara tetangga lainnya, seperti Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Hubungan antarbangsa di Asia Tenggara bahkan terlembaga dalam wadah ASEAN, di mana Indonesia masih dipandang sebagai “pemimpin informal” (*informal leader*). Hubungan baik antarbangsa dan posisi Indonesia di ASEAN menghadirkan peluang

untuk meningkatkan kesadaran bela negara generasi muda Indonesia. Peran Pemerintah Indonesia dalam menengahi sengketa wilayah di kawasan Laut Cina Selatan (LCS), misalnya, dapat melahirkan kebanggaan, sehingga akan meningkatkan rasa cinta tanah air generasi muda bangsa. Selain itu, hubungan antarbangsa yang diwujudkan melalui program-program kebudayaan (*people to people*) juga dapat memfasilitasi generasi muda untuk mengenal bangsa-bangsa lain dan meningkatkan rasa cinta tanah air mereka, khususnya di kalangan pemuda yang menjadi perwakilan Indonesia.

Kendati secara umum relasi Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara relatif baik dan harmonis, namun ada kalanya terjadi dinamika. Sebagai contoh, relasi Indonesia–Malaysia yang kerap diwarnai persoalan, seperti klaim sepihak Malaysia atas berbagai warisan budaya Indonesia, seperti lagu daerah Rasa Sayang-Sayange dari Maluku, Tari Pendet dari Bali, angklung dari Sunda, wayang kulit dan gamelan dari Jawa.²³ Di satu sisi, insiden semacam ini kerap memicu reaksi masyarakat Indonesia yang merasa memiliki berbagai kebudayaan daerah tersebut. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa banyak di antara masyarakat Indonesia sendiri masih abai terhadap khazanah kebudayaan nusantara, sehingga diklaim oleh negara lain. Dengan kata lain, klaim kebudayaan Indonesia oleh Malaysia lebih merupakan gejala, bahwa bangsa Indonesia sendiri masih harus berusaha lebih baik lagi dalam menghidupkan dan melestarikan kebudayaan nasionalnya. Semakin kondisi ini dibiarkan, maka dalam jangka panjang akan semakin melemahkan rasa cinta bangsa Indonesia terhadap tanah air dan kebudayaannya sendiri. Dalam hal inilah dinamika dalam hubungan antarbangsa dengan negara-negara tetangga juga dapat menjadi ancaman bagi kesadaran bela negara generasi muda.

c. Lingkungan Strategis Nasional

Identifikasi terhadap dinamika lingkungan strategis pada tataran nasional akan dilakukan berdasarkan lima gatra (*Panca Gatra*) yang menyusun

²³ CNN Indonesia, “Relasi Indonesia–Malaysia, Serumpun Kadang Tak Rukun,” *CNNIndonesia.com*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190828153113-106-425408/relasi-indonesia-malaysia-serumpun-kadang-tak-rukun/2>, 27 April 2020.

ketahanan nasional pada aspek sosialnya. Berikut uraian kekuatan dan kelemahan untuk tiap-tiap gatra.

1) Gatra Ideologi

Hingga saat ini radikalisme tetap menjadi permasalahan utama terkait gatra ideologi. Menurut hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada bulan April–Juli 2019, Indeks Potensi Radikalisme di Indonesia berkisar 38,43%.²⁴ Dalam kondisi ini, Pancasila terbukti masih menjadi ideologi yang dapat memayungi kemajemukan bangsa Indonesia di tengah-tengah perkembangan radikalisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat keyakinan masyarakat akan Pancasila, pemerintah juga telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2018. Oleh karena itu, Pancasila yang terus-menerus disosialisasikan, baik melalui program pemerintah maupun inisiatif masyarakat sendiri, merupakan kekuatan dalam meningkatkan keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara.

Namun perlu diwaspadai pada era Revolusi Industri 4.0, jaringan radikalisme telah mengglobal dan masuk ke Indonesia salah satunya melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial. Melalui media sosial, gagasan-gagasan radikal yang bersumber dari luar negeri mengalami sirkulasi di Indonesia, misalnya gagasan kekhilafahan Islam yang dibawa oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan Hizbut Tahrir. Masih belum optimalnya upaya deteksi dini dalam mencegah perkembangan paham-paham asing dan radikal yang tidak sesuai Pancasila merupakan salah satu kelemahan dalam meningkatkan keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara.

2) Gatra Politik

Sejak Reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami demokratisasi yang dari waktu ke waktu kian menunjukkan kematangan. Sebagai bagian dari proses demokratisasi, kebijakan desentralisasi dan

²⁴ Lisye Sri Rahayu, “BNPT Bikin Survei, Hasilnya Potensi Radikalisme Menurun Tahun Ini,” *Detik.com* (10 Desember 2019).

otonomi daerah juga dijalankan untuk memeratakan pembangunan nasional ke seluruh wilayah Indonesia dan mencegah berpusatnya kekuasaan yang dapat melahirkan pemerintahan otoritarian. Dengan demikian, desentralisasi dan otonomi daerah menjadi kekuatan dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kendati demokratisasi telah berjalan selama lebih dari dua dasawarsa, namun korupsi politik masih menjadi permasalahan utama. Sebagian pihak memandang korupsi politik di Indonesia sudah menjadi sistemik bahkan mencapai taraf “jenis korupsi kelembagaan yang terintegrasi.”²⁵ Selain itu, dalam praktik demokrasi langsung, khususnya dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, salah satu isu yang kerap mencuat adalah konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik dan politik identitas, sehingga berpotensi melahirkan disintegrasi. Sistem politik yang berpotensi korup dan praktik demokrasi yang berpotensi konflik masih menjadi kelemahan dalam upaya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara generasi muda.

3) Gatra Ekonomi

Hingga saat ini, pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional masih menjadi persoalan bagi bangsa Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif sejak tahun 2014 di berbagai daerah, khususnya di daerah-daerah perbatasan antarnegara, dalam jangka panjang diharapkan dapat memeratakan pembangunan nasional. Demikian halnya pengembangan sektor pariwisata yang dimotori promosi digital, diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di berbagai daerah. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor pariwisata ini dapat menjadi kekuatan dalam meningkatkan kecintaan terhadap tanah air, karena dapat meningkatkan keterhubungan fisik maupun emosional masyarakat di daerah dengan pusat.

²⁵ M. Aqil Irham, *Demokrasi Muka Dua* (Jakarta: KPG, 2016), hal. 13.

Namun demikian, dalam menggerakkan roda perekonomian di berbagai daerah, Indonesia masih bergantung pada kegiatan ekonomi di sektor ekstraktif. Padahal eksplorasi sumber daya nasional di sektor ekstraktif bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan tetapi juga berdampak pada terpinggirkannya masyarakat lokal dan ketimpangan ekonomi di masyarakat, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam proses pembangunan nasional. Ketimpangan yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa “ditinggalkan” dalam proses pembangunan ini merupakan kelemahan di bidang ekonomi dalam upaya peningkatan kecintaan terhadap tanah air.

4) Gatra Sosial–Budaya

Sebagai masyarakat majemuk, relasi antarkelompok masyarakat di Indonesia senantiasa menjadi isu yang perlu diperhatikan. Dalam kaitannya dengan peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, karakteristik masyarakat Indonesia yang memiliki kapital sosial (*social capital*) cukup tinggi merupakan salah satu kekuatan utama. Hal ini terlihat setiap kali terjadi bencana, masyarakat bergotong-royong, misalnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 di tahun 2020.²⁶ Selain itu, sebagai bangsa yang majemuk, masyarakat Indonesia terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai kelompok dari latar belakang budaya berbeda, sehingga cenderung bertumbuh sebagai masyarakat inklusif. Karakteristik ini merupakan bekal yang kuat untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi.

Namun demikian, di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, fenomena intoleransi mencuat pada beberapa tahun ke belakang. Misalnya, kasus-kasus sulitnya mendirikan rumah ibadah oleh kelompok minoritas di suatu daerah, seperti penolakan pembangunan pura di Desa Sukaurip, Kabupaten Bekasi, pada 2015 dan gereja GKI di Kota Bogor

²⁶ Shane Preuss, “Indonesia and Covid-19: What the World Is Missing,” *The Diplomat* (24 April 2020), diakses dari <https://thediplomat.com/2020/04/indonesia-and-covid-19-what-the-world-is-missing/>, 27 April 2020.

pada 2012,²⁷ ataupun penolakan pembangunan masjid di Manokwari pada 2015²⁸ dan di Parepare pada 2019.²⁹ Fenomena intoleransi juga kerap teramplifikasi oleh persebaran pesan-pesan provokatif dan *hoax* di media sosial. Oleh karena itu, kerentanan sosial akibat intoleransi masih menjadi kelemahan yang harus diatasi dalam upaya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara generasi muda.

5) Gatra Pertahanan–Keamanan

Dalam bidang pertahanan–keamanan, salah satu isu yang terus-menerus menjadi perhatian adalah potensi terorisme. Berbeda dengan radikalisme yang cenderung bekerja di tataran pemikiran dan pertarungan gagasan, terorisme mewujud dalam aksi-aksi kekerasan dalam upaya merongrong kewibawaan negara. Oleh karena itu, aksi terorisme senantiasa berdampak langsung terhadap ketertiban bidang pertahanan maupun terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengembangan institusional, misalnya dengan pembentukan BNPT, maupun penguatan instrumen legal dalam memerangi terorisme merupakan bentuk kekuatan dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi negara.

Namun demikian, untuk dapat mengimplementasikan sistem pertahanan dan keamanan semesta, termasuk dalam menghadapi ancaman terorisme, kesadaran bela negara perlu dibangun secara masif di kalangan masyarakat luas pada umumnya. Hanya saja, konsep bela negara sendiri hingga saat ini nampaknya masih belum terinternalisasi dan terpahami dengan baik oleh masyarakat luas. Belum terbangunnya kedekatan dan pemahaman masyarakat akan bela negara merupakan salah satu kelemahan utama di bidang pertahanan–keamanan.

²⁷ Desi Purnamasari, “Problem Umat Agama Minoritas: Susah Mendirikan Rumah Ibadah,” *Tirto.id* (16 Mei 2019), diakses dari <https://tirto.id/problem-umat-agama-minoritas-susah-mendirikan-rumah-ibadah-dJcE>, pada 12 Juni 2020.

²⁸ Mawa Kresna, “Perda Manokwari Kota Injil: Demo Menolak Pembangunan Masjid,” *Tirto.id* (8 Januari 2019), diakses dari <https://tirto.id/perda-manokwari-kota-injil-demo-menolak-pembangunan-masjid-ddsl>, pada 12 Juni 2020.

²⁹ Andi Fardi, “Sejumlah Warga Parepare Tolak Pembangunan Masjid di Lumpue,” *Sulselsatu.com* (26 September 2019), diakses dari <https://www.sulselsatu.com/2019/09/26/sulsel/ajattapareng/sejumlah-warga-parepare-tolak-pembangunan-masjid-di-lumpue.html>, pada 12 Juni 2020.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Bab ini berisikan pembahasan mengenai uraian untuk menjawab pertanyaan kajian yang telah dirumuskan sebelumnya. Pertanyaan kajian tersebut terkait dengan tiga unsur bela negara yang menjadi fokus dari penulisan Taskap ini, yakni bagaimana kesadaran bela negara generasi muda bangsa di era Revolusi Industri 4.0 ditinjau dari unsur cinta tanah air, unsur kesadaran berbangsa dan bernegara, dan unsur keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah menguraikan kondisi kesadaran bela negara generasi muda bangsa dari tiap-tiap unsur tersebut, pembahasan di dalam bab ini juga akan diarahkan pada upaya merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bela negara generasi muda bangsa pada tiap-tiap unsur dimaksud.

13. Kesadaran Bela Negara Ditinjau dari Unsur Cinta Tanah Air

Cinta tanah air merupakan “sikap warga negara terhadap tanah airnya yang menunjukkan kesatuan lahir-batin dengan segala dimensi tanah airnya, baik sebagai (i) tanah air fisik: wilayah, ruang kehidupan, tanah tumpah darah, di mana seluruh warga negara menjalani kehidupannya, (ii) tanah air formal: Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun (iii) tanah air mental: ideologi Pancasila.”¹ Cinta tanah air tampak pada sikap dan tindakan dalam “mempertahankan tanah air dan membela negara” untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.²

Sebagaimana terkandung dalam pengertian yang sudah dijelaskan, konsep tanah air memiliki setidaknya tiga dimensi, yakni tanah air fisik, tanah air formal, dan tanah air mental. Dalam kaitannya dengan Indeks Ketahanan Nasional (IKN), unsur cinta tanah air berkaitan erat dengan gatra ekonomi. Secara sekilas, unsur cinta tanah air pada bela negara dan gatra ekonomi pada ketahanan nasional barangkali tidak begitu terlihat hubungannya. Kendati demikian, seiring dengan penjelasan pada paragraf-paragraf selanjutnya, akan semakin terang terlihat bagaimana

¹ Ditjen Pothan Kemhan RI, *Modul Bela Negara: Cinta Tanah Air* (Jakarta: Ditjen Pothan Kemhan RI, 2016), hal. 9.

² *Ibid.*, *Modul Bela Negara: Cinta Tanah Air*, hal. 49–50.

keduanya berhubungan. Khususnya dalam konteks dimensi tanah air fisik, di mana pembangunan ekonomi dituntut untuk berjalan beriringan dengan pemeliharaan alam lingkungan, namun dalam realisasinya justru sering kali malah saling bertentangan dan perlu dicarikan jalan tengah bagi keduanya. Oleh karena itu, penulis akan kembali lagi pada keterhubungan ini nantinya. Untuk saat ini, cukuplah kiranya penulis ulas seperlunya saja, bahwa skor IKN untuk gatra ekonomi selama lima tahun terakhir sejak 2015 hingga 2019 selalu berada pada kategori “cukup tangguh,” yakni untuk masing-masing tahun secara berturut-turut sebesar 2,63; 2,73; 2,76; 2,86; dan 2,86.³

a. Cinta Tanah Air pada Dimensi Tanah Air Fisik

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, dimensi tanah air fisik mengacu pada kondisi fisik geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta di antara Benua Asia dan Australia. Tanah air fisik merupakan ruang kehidupan (*Lebensraum*) bagi seluruh penduduk Indonesia yang menyediakan segenap sumber daya yang dapat dieksplorasi dan dieksplorasi untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Dalam konteks ini, tanah air fisik menjadi potensi yang dapat diaktualisasikan untuk membangun ketahanan gatra ekonomi.

Terkait dimensi tanah air fisik, ancaman utama hadir dalam bentuk isu-isu lingkungan yang dibingkai dalam isu besar pemanasan global (*global warming*). Oleh karena itu, dalam menghadapi ancaman terhadap tanah air fisik tersebut, bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari konteks lingkungan strategis global yang lebih besar. Hal ini mengingat ancaman terhadap tanah air fisik Indonesia dalam konteks pemanasan global juga merupakan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia secara keseluruhan, tidak peduli akan perbedaan bangsa maupun negaranya.

Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia karena memiliki kawasan hutan hujan tropis (*tropical rain forest*) terluas ketiga di dunia setelah

³ Dadan U. Daihani, “Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS,” Paparan disampaikan pada *Lokakarya Bela Negara Wantannas RI*, 2019.

⁴ *Ibid.*, *Modul Bela Negara: Cinta Tanah Air*, hal. 51–52.

Brasil dan Kongo. Luas hutan hujan tropis di Indonesia mencapai 109 juta hektar pada 2003.⁵ Namun demikian, sejak tahun 1970 penggundulan hutan semakin marak di Indonesia, dan hingga tahun 2009 saja luas hutan alam yang tersisa di Indonesia diperkirakan hanya 28% dari luas semula.⁶ Penyusutan luas tersebut terjadi utamanya akibat berbagai macam kegiatan ekonomi ekstraktif, seperti pembalakan, pertambangan, dan perkebunan.

Selain hutan hujan tropis, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat tinggi. Khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, keberadaan terumbu karang merupakan ekosistem yang menyediakan ruang hidup bagi ribuan jenis biota laut. Perairan laut Indonesia memiliki 569 jenis terumbu karang atau sekitar 70% dari semua jenis terumbu karang di dunia.⁷ Sayangnya, berdasarkan hasil penelitian LIPI pada tahun 2018, sebanyak 36% terumbu karang di 108 lokasi di Indonesia telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan meningkatnya suhu air laut, serta berbagai kegiatan manusia seperti pencemaran, pengeboman, dan pengambilan karang secara berlebihan.⁸

Kondisi-kondisi kerusakan lingkungan di atas merupakan ancaman serius bagi tanah air fisik Indonesia. Oleh karena ancaman tersebut lebih banyak bersumber dari aktivitas manusia, maka dapat dikatakan bahwa parahnya kerusakan lingkungan di Indonesia merupakan cerminan dari maraknya sikap dan tindakan yang bertentangan dengan cinta tanah air. Kerusakan hutan akibat pembalakan, pertambangan, dan perkebunan berskala besar yang mengabaikan dampak lingkungan, lebih didasari oleh dorongan untuk melakukan eksplorasi tanpa mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan, bahkan tanpa mempertimbangkan hajat hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan yang tidak selalu dapat diukur dengan keuntungan ekonomis dan material. Eksplorasi hutan telah menjadi ancaman serius terhadap cara hidup tradisional dan kearifan lokal masyarakat

⁵ WWF, "Deforestasi," [WWF.or.id](https://www.wwf.or.id/?10741/Deforestasi) (1 Mei 2009), diakses dari <https://www.wwf.or.id/?10741/Deforestasi>, pada 6 Mei 2020.

⁶ *Ibid.*, WWF.

⁷ Erric Permana, "LIPI: Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia Makin Parah," [AA.com.tr](https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/lipi-kerusakan-terumbu-karang-di-indonesia-makin-parah/1323787) (28 November 2018), diakses dari <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/lipi-kerusakan-terumbu-karang-di-indonesia-makin-parah/1323787> pada 6 Mei 2020.

⁸ *Ibid.*, Erric Permana.

setempat, seperti masyarakat Dayak di Kalimantan dan suku-suku pedalaman di Papua. Demikian halnya eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya kelautan.

Kegiatan mengeksplorasi dan mengeksplorasi kekayaan sumber daya dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus benar-benar dilaksanakan dengan itikad mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat yang telah memiliki kearifan lokal yang terikat dengan konteks alam lingkungannya.

Hasil-hasil penelitian dan pengembangan, serta berbagai diskursus menyoal kerusakan lingkungan dan pemanasan global dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari tulisan-tulisan ilmiah hingga populer, telah banyak didiseminasi dan bersirkulasi melalui internet. Sebagai generasi yang sangat dekat dan akrab dengan keberadaan internet, generasi muda bangsa saat ini juga memiliki kesempatan sangat luas untuk mengakses informasi tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kelestarian lingkungan nampaknya cukup terbangun di kalangan generasi muda. Hal ini tercermin dalam banyaknya gerakan-gerakan swadaya baik dalam bentuk komunitas-komunitas, organisasi-organisasi nonformal, bahkan forum-forum diskusi dan kajian oleh kalangan generasi muda yang secara gencar mengangkat isu-isu lingkungan. Tujuan mereka pada umumnya adalah membangun kesadaran dan gerakan konkret untuk menghentikan kerusakan lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Gerakan-gerakan ini misalnya berupa komunitas pertanian perkotaan (*urban farming*) yang berfokus pada ketahanan pangan di lingkungan perkotaan,⁹ gerakan tanpa sampah plastik (*zero plastic-waste*),¹⁰ hingga penggalangan dana untuk konservasi

⁹ Adi Renaldi, "Para Petani Urban di Jakarta Beri Bukti Kalian Bisa Bercocok Tanam di Lahan Apapun," *Vice.com* (6 Mei 2020), diakses dari https://www.vice.com/id_id/article/m7jq74/teknik-urban-farming-komunitas-indonesia-berkebun pada 7 Mei 2020.

¹⁰ Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, "Tentang Kami," *dietkantongplastik.info*, diakses dari <https://dietkantongplastik.info/tentang-kami/> pada 7 Mei 2020.

lingkungan hidup.¹¹ Berbagai gerakan ini, secara tidak langsung, juga merupakan perwujudan dari kecintaan terhadap tanah air, khususnya tanah air fisik. Namun demikian, pada umumnya gerakan-gerakan ini memiliki skala yang terbilang kecil dan sporadis.

b. Cinta Tanah Air pada Dimensi Tanah Air Formal

Selanjutnya, dimensi tanah air formal mengacu pada konsep negara-bangsa (*nation-state*) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹² Kecintaan terhadap tanah air dalam dimensi ini harus dibangun di atas pemahaman mendasar bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan, bukan negara federal/serikat, sebagaimana digagas oleh para tokoh pendiri bangsa, seperti Mr. Soepomo dan Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 30–31 Mei 1945.¹³ Pandangan para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia ini didasarkan pada pemahaman bahwa bangsa Indonesia terdiri atas penduduk yang memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama yang berdiam menyebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Berdasarkan karakteristik ini, maka bentuk negara kesatuan akan lebih dapat menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mendirikan sebuah negara-bangsa yang utuh dan berdaulat, sementara negara serikat atau federasi akan berujung pada perpecahan.

Dalam konteks kehidupan generasi muda bangsa pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini, kesadaran akan tanah air formal dalam bentuk negara kesatuan tersebut nampaknya sudah cukup terbangun. Perkembangan globalisasi telah meningkatkan mobilitas generasi muda. Di satu sisi, informasi yang relatif mudah didapat tentang kehidupan di daerah lain telah menumbuhkan keinginan generasi muda untuk bepergian dan lebih mengenal masyarakat dari daerah dan kebudayaan yang berbeda. Di sisi lain, kemajuan transportasi dan pembangunan sektor pariwisata telah memudahkan pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain dengan ongkos yang

¹¹ Intan W. K. Putri, “Platform Konservawi Lingkungan itu Bernama LindungiHutan,” *Ecolify.org* (10 Maret 2020), diakses dari <https://ecolify.org/blog/lindungihutan-platform-konservasi-lingkungan> pada 7 Mei 2020.

¹² *Ibid.*, *Modul Bela Negara: Cinta Tanah Air*, hal. 52.

¹³ Lemhannas RI, *Modul Bidang Studi Konsensus Dasar Bangsa: Sub Bidang Studi NKRI* (Jakarta: Lemhannas RI, 2020), hal. 89.

semakin ekonomis. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang sampai kepada generasi muda bangsa di mana pun mengenai berbagai kebudayaan di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini meningkatkan kesadaran generasi muda akan keragaman budaya bangsanya, sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman bahwa keragaman tersebut merupakan bagian dari satu identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Dengan tumbuhnya kesadaran ini, rasa memiliki atas keragaman budaya nasional tersebut dapat diperkuat sehingga di masa yang akan datang klaim kebudayaan Indonesia oleh negara lain (seperti yang terjadi pada lagu daerah Rasa Sayang-Sayange dari Maluku, Tari Pendet dari Bali, angklung dari Sunda, serta wayang kulit dan gamelan dari Jawa yang sempat diklaim Malaysia)¹⁴ dapat dicegah.

Namun demikian, masih terjadi fenomena-fenomena yang menunjukkan bahwa kecintaan terhadap tanah air pada dimensi tanah air formal perlu untuk lebih dikuatkan. Pada tahun 2017, misalnya, Survei Nilai-Nilai Kebangsaan oleh BPS menunjukkan bahwa 18% orang Indonesia tidak mengetahui judul lagu kebangsaan Republik Indonesia, 24% tidak hafal semua sila Pancasila, 53% tidak hafal lirik lagu kebangsaan, dan 55% orang Indonesia jarang atau tidak pernah mengikuti kerja bakti di lingkungannya.¹⁵ Pada beberapa kesempatan juga dijumpai kejadian-kejadian di mana generasi muda tidak hafal Pancasila maupun lirik lagu “Indonesia Raya,” seperti yang terjadi di kalangan pelajar di Jawa Timur yang kedapatan bolos sekolah pada awal 2020.¹⁶ Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap tanah air masih dapat dikatakan lemah pada sebagian masyarakat Indonesia.

Salah satu ancaman nyata yang masih menghantui kesadaran bela negara pada unsur cinta tanah air adalah ketimpangan pembangunan

¹⁴ CNN Indonesia, “Relasi Indonesia–Malaysia, Serumpun Kadang Tak Rukun,” *CNNIndonesia.com*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190828153113-106-425408/relasi-indonesia-malaysia-serumpun-kadang-tak-rukun/2>, 27 April 2020.

¹⁵ “Mantapkan Nilai Pancasila,” *Kompas* (25 Juli 2017).

¹⁶ “Pelajar Bolos Dihukum Menyanyikan Indonesia Raya, Ternyata Tak Ada yang Hafal,” *JPNN.com* (15 Januari 2020), diakses dari <https://www.jpnn.com/news/pelajar-bolos-dihukum-menyanyi-indonesia-raya-ternyata-tak-ada-yang-hafal>; “Dihukum Nyanyi Lagu Wajib dan Sebutkan Nama Pahlawan, Sebagian Pelajar Tak Hafal,” *NusaDaily.com* (20 Februari 2020), diakses dari <https://nusadaily.com/jatim/dihukum-nyanyi-lagu-wajib-dan-sebutkan-nama-pahlawan-sebagian-pelajar-tak-hafal.html>.

nasional. Akibat dari kondisi ini terlihat dari beberapa kasus yang menunjukkan dinamika di daerah-daerah perbatasan, khususnya perbatasan darat dengan negara Malaysia di Pulau Kalimantan. Pada tahun 2015 pernah mengemuka pemberitaan tentang adanya sepuluh desa di Kalimantan Timur yang menyatakan ingin bergabung dengan Malaysia.¹⁷ Menurut Gubernur Kaltim saat itu, Awang Faroek, motivasi kesepuluh desa tersebut adalah ketiadaan infrastruktur yang memadai di desanya. Dengan kata lain, pernyataan semacam ini sebenarnya merupakan ekspresi kekecewaan dan keprihatinan terhadap proses pembangunan nasional yang belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Tidak dapat dimungkiri bahwa hingga saat ini, pemerataan pembangunan belum dapat tercapai sepenuhnya di semua daerah, termasuk daerah perbatasan, sekalipun sejak 2014 Pemerintah Indonesia telah mulai memberikan perhatian lebih kepada pembangunan fisik daerah perbatasan. Di saat yang bersamaan, hingga saat ini kondisi kecamatan-kecamatan dan desa-desa di daerah perbatasan di Kalimantan masih “kalah maju” jika dibandingkan dengan kota tetangganya di negeri jiran.¹⁸ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika generasi muda di daerah-daerah tersebut tertarik untuk mencari penghidupan di negara tetangga. Sekalipun hingga saat ini ketimpangan pembangunan, khususnya di antara daerah-daerah perbatasan dengan kota-kota tetangga di Malaysia Timur, tidak sampai menimbulkan gerakan makar, namun setidaknya kondisi ini berpotensi besar menurunkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai bagian dari NKRI, sehingga secara tidak langsung akan menyebabkan terkisihnya kecintaan terhadap tanah air di kalangan generasi muda di daerah-daerah perbatasan.

c. Cinta Tanah Air pada Dimensi Tanah Air Mental

Adapun dimensi yang ketiga, tanah air mental, tidak bersifat teritorial dan tidak dibatasi ruang-waktu, namun mengandung nilai-nilai dasar yang

¹⁷ Putri Artika R., “Gubernur Kaltim Lapor Jokowi Ada 10 Desa Mau Gabung Malaysia,” Merdeka.com (15 April 2015), diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-kaltim-lapor-jokowi-ada-10-desa-mau-gabung-malaysia.html> pada 8 Mei 2020.

¹⁸ Balitbang Kemhan RI, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Perbatasan Indonesia–Malaysia di Pulau Kalimantan dalam rangka Pertahanan Negara,” *Laporan Penelitian* (Jakarta: Balitbang Kemhan RI, 2017).

melandasi kokoh berdirinya negara-bangsa NKRI.¹⁹ Tanah air mental bangsa Indonesia terwujud dalam ideologi Pancasila.²⁰ Kecintaan terhadap tanah air mental ini sangat beririsan dengan unsur keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, pembahasan tentangnya akan dilakukan pada pasal selanjutnya ketika membahas unsur keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara.

Berdasarkan uraian pada pasal sebelumnya, dapat ditarik pemahaman bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya kecintaan terhadap tanah air pada dimensi tanah air fisik, adalah rendahnya pengetahuan tentang keterkaitan antara fenomena pemanasan global dengan menurunnya kualitas lingkungan Indonesia di tingkat lokal. Dalam hal ini, kesadaran untuk memelihara tanah air fisik yang mulai terbentuk di kalangan generasi muda cenderung masih terimplementasikan hanya melalui wadah-wadah yang skalanya sangat terbatas dan sifatnya sporadis. Adapun pada dimensi tanah air formal, salah satu faktor penyebab rendahnya kecintaan terhadap tanah air adalah belum meratanya pembangunan nasional yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi, terutama di daerah-daerah perbatasan, juga dapat menurunkan kecintaan terhadap tanah air pada kalangan generasi muda khususnya di daerah tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, terdapat dua konsep solusi yang coba ditawarkan, yakni *branding bela negara* dan penyelenggaraan pendidikan karakter dengan fokus pada peningkatan unsur cinta tanah air. *Branding bela negara* merupakan upaya penting dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara generasi muda di era Revolusi Industri 4.0. Hal ini karena, kendati diakui bahwa bela negara merupakan suatu konsep yang penting, namun tingkat pemahaman masyarakat sendiri tentang apa itu bela negara nampaknya masih jauh dari yang diharapkan. Memang tidak ada data kuantitatif yang secara pasti dapat menggambarkan seberapa tinggi atau rendah tingkat pemahaman masyarakat luas akan bela negara. Di satu sisi, karena memang pengukuran semacam ini merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Di sisi lain, mesti diakui pula bahwa konsep bela negara sendiri masih sangat abstrak. Hal ini terlihat, salah

¹⁹ Ibid., Modul Bela Negara: Cinta Tanah Air, hal. 52.

²⁰ Daoed Joesoef, *Pikiran dan Gagasan Daoed Joesoef: 10 Wacana tentang Aneka Masalah Kehidupan Bersama* (Jakarta: Penerbit PT Kompas, 2011).

satunya dari sulitnya mencari padanan kata yang memadai untuk istilah bela negara dalam bahasa asing atau bahkan bahasa daerah. Ini menunjukkan bahwa diskursus tentang bela negara, baik yang sifatnya “populer” maupun “ilmiah,” belum cukup terbangun dengan mantap, terlepas dari banyaknya tulisan yang membahas fenomena bela negara maupun pengaturan bela negara dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting untuk pertama-tama “memasyarakatkan” bela negara hingga masyarakat luas benar-benar akrab dengan konsep tersebut, kalaupun belum sampai benar-benar memahami. Dalam perspektif teori *branding*, upaya ini diperlukan untuk membangun “kesadaran akan merek”²¹ bela negara di kalangan masyarakat luas.

Dalam kaitannya dengan unsur cinta tanah air, *branding* bela negara perlu diarahkan pada keberkaitan antara konsep bela negara dengan kecintaan dan kemauan untuk melestarikan alam lingkungan. Dalam hal ini, Kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat berperan sebagai *leading sector*. Dalam melestarikan lingkungan hutan maupun laut, kedua kementerian ini sebenarnya sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun demikian, hingga saat ini berbagai upaya pelestarian tersebut belum diintegrasikan dengan konsep bela negara, sehingga seolah-olah antara pelestarian lingkungan dan bela negara tidak memiliki kaitan, padahal sangat erat satu sama lain.

Upaya selanjutnya adalah penyelenggaraan pendidikan karakter untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air. Secara konseptual, unsur cinta tanah air dapat ditumbuhkan melalui berbagai upaya, di antaranya mencintai dan melestarikan lingkungan hidup (dalam konteks tanah air fisik), serta mengenal dan memahami wilayah Nusantara dengan sebaik-baiknya (dalam konteks tanah air formal).²² Kesediaan dan kemampuan untuk mencintai dan melestarikan lingkungan hidup perlu ditumbuhkembangkan, mula-mula dengan memberikan pengetahuan yang memadai tentang kondisi lingkungan hidup saat ini dan ancaman yang dihadapinya. Mengingat saat ini pemanasan global tengah menjadi isu dan

²¹ David A. Aaker, “The Value of Brand Equity,” *Journal of Business Strategy* Vol. 12 No. 4 (1992), hal. 27–32.

²² *Ibid.*, *Modul Bela Negara: Cinta Tanah Air*, hal. 58–74.

perhatian bersama semua bangsa di dunia, maka pengetahuan tentang lingkungan hidup di Indonesia pun perlu didudukkan dalam konteks global yang lebih besar ini. Selain pengetahuan deskriptif tersebut, diperlukan pula pengembangan pengetahuan praktis untuk dapat melakukan tindakan-tindakan riil di tingkat lokal. Misalnya, pengetahuan tentang pola hidup yang sadar dan ramah lingkungan. Hal ini terkait erat dengan pola hidup konsumerisme yang merebak pada masyarakat kontemporer. Dengan demikian, pendidikan tentang kelestarian lingkungan harus disertai dengan pendidikan tentang cara hidup “alternatif” yang lebih baik dari konsumerisme. Di luar wadah-wadah pendidikan formal, pendidikan lingkungan ini dapat pula ditingkatkan secara tidak langsung dengan memfasilitasi pengembangan organisasi-organisasi, komunitas-komunitas, maupun gerakan-gerakan swadaya masyarakat di bidang lingkungan.

Selanjutnya, pemahaman dan pengenalan wilayah Nusantara juga perlu ditumbuhkembangkan. Dalam ruang-ruang pendidikan formal, materi terkait hal ini dapat diajarkan dengan menyertakannya ke dalam berbagai mata pelajaran, seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, geografi, sosiologi, dan lain-lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan *leading sector* dalam upaya ini. Selain itu, pemahaman dan pengenalan wilayah Nusantara juga dapat diintensifkan melalui produksi konten-konten media sosial yang meliput kekayaan dan keragaman alam maupun kehidupan sosial di Indonesia. Untuk hal ini, pemerintah (misalnya melalui Kementerian Pariwisata) tidak perlu membuat sendiri semua konten tersebut. Pemerintah cukup memberikan insentif kepada para “influencer” di media sosial untuk mempromosikan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Di saat yang sama, perlu juga diberikan insentif bagi penelitian-penelitian sosial yang berfokus pada kehidupan bangsa Indonesia, misalnya yang dilakukan oleh para akademisi dari bidang ilmu antropologi, sosiologi, maupun disiplin lainnya. Semakin banyak produksi informasi yang produktif tentang wilayah Nusantara, maka pengenalan dan pemahaman, serta pada gilirannya kecintaan, terhadap tanah air Indonesia pun akan semakin bertumbuh.

14. Kesadaran Bela Negara Ditinjau dari Unsur Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran berbangsa dapat diartikan sebagai “kesadaran untuk membangun hidup bersama sebagai satu bangsa,” sementara kesadaran bernegara dapat diartikan sebagai “kesadaran untuk membangun negara yang kuat agar menjadi tempat kita bersinergi mengejar cita-cita bersama sebagai satu bangsa.”²³ Mengutip pandangan antropolog Clifford Geertz, Indonesia merupakan “negara baru yang terdiri dari kelompok masyarakat yang lama.”²⁴ Hal ini mengandung makna bahwa sebelum NKRI berdiri sebagai sebuah negara-bangsa melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah ada kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai macam suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Nusantara yang kemudian disatukan secara politis lewat pembentukan negara-bangsa Indonesia. Berawal dari keragaman suku bangsa ini, penyatuan politis tersebut harus pula berjalan beriringan dengan pembangunan wawasan kebangsaan, di mana identitas sebagai bangsa Indonesia mengatasi dan menyatukan semua perbedaan suku bangsa yang telah ada sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan Indeks Ketahanan Nasional (IKN), unsur kesadaran berbangsa dan bernegara berturut-turut berkaitan erat dengan gatra sosial budaya dan politik. Dalam hal ini, kesadaran berbangsa yang tinggi akan berbanding lurus dengan tangguhnya gatra sosial budaya, sementara kesadaran bernegara yang tinggi berbanding lurus dengan tangguhnya gatra politik. Namun demikian, dibandingkan dengan gatra-gatra lain, skor IKN untuk gatra sosial budaya termasuk yang paling rendah dalam rentang lima tahun ke belakang. Sejak tahun 2015 hingga 2019, gatra sosial budaya selalu berada pada kategori “kurang tangguh,” dengan skor dari tahun 2015 hingga 2019 berturut-turut adalah 2,20; 2,14; 2,16; 2,30; dan 2,30. Adapun untuk gatra politik, sejak tahun 2015 hingga 2017 skor IKN-nya berada pada kategori “kurang tangguh,” berturut-turut adalah 2,39; 2,43; dan 2,43. Baru pada 2018 hingga 2019, skor IKN untuk gatra politik meningkat ke kategori “cukup tangguh,” yakni 2,67 dan 2,67.²⁵

²³ Ditjen Pothan Kemhan RI, *Modul Bela Negara: Kesadaran Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Ditjen Pothan Kemhan RI, 2016), hal. 6.

²⁴ *Ibid.*, *Modul Bela Negara: Kesadaran Berbangsa dan Bernegara*, hal. 18.

²⁵ Dadan U. Daihani, “Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS,” Paparan disampaikan pada *Lokakarya Bela Negara Wantannas RI*, 2019.

a. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara pada Dimensi Kesadaran Berbangsa

Dalam konteks kehidupan berbangsa, ancaman nyata yang muncul pada beberapa tahun terakhir berupa fenomena intoleransi dan radikalisme. Sebelumnya, sejak awal tahun 2000-an Indonesia diguncang berbagai aksi terorisme, beberapa di antaranya tragedi Bom Bali I (12 Oktober 2002) dan Bom Bali II (1 Oktober 2005), Bom JW Marriott (5 Agustus 2003), dan Bom Kedubes Australia (9 September 2004). Dengan terbunuhnya buronan teroris dr. Azahari pada 2005 dan Noordin M. Top pada 2009 pada saat penangkapan, aksi terorisme relatif mereda, meski tidak hilang sepenuhnya.

Pada 14 Januari 2016 terjadi penyerangan bersenjata di Sarinah, Jakarta, dan pada 13–14 Mei 2018 terjadi pengeboman beberapa gereja di Surabaya. Aksi terorisme yang terjadi belakangan tidak lagi terhubung ke organisasi Jamaah Islamiyah (JI). Kendati demikian, aksi-aksi terorisme tersebut tetap memiliki keterkaitan dengan organisasi teroris transnasional, yakni *Negara Islam Irak dan Suriah* atau NIIS (*Islamic State of Iraq and Syria/ISIS*). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika gerakan radikal yang muncul pada beberapa tahun terakhir juga dapat ditelusuri jaringannya hingga ke organisasi radikal transnasional. Dalam hal ini, contoh kasus yang pernah mengemuka adalah keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung ide kekhilafahan untuk menggantikan NKRI yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Mantan Menhan Ryamizard Ryacudu pernah mengungkapkan keprihatinannya pada 19 Juni 2019 karena sebanyak 3% prajurit TNI, 18,1% pegawai swasta, 19,4% PNS, dan 19,1% pegawai BUMN telah terpapar radikalisme dan mengaku tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Selain itu, sebanyak 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA lebih menyetujui khilafah.²⁶ Kondisi ini pun mendorong Kementerian Kominfo untuk merilis

²⁶ "BPIP-TNI Pulihkan Prajurit Terpapar Paham Anti-Pancasila," *Beritasatu.com* (23 Oktober 2019), diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/581382-bpiptni-pulihkan-prajurit-terpapar-paham-antipancasila>, 10 Juni 2020.

portal *AduanASN.id* untuk melaporkan ASN yang diduga terpapar radikalisme dan anti-Pancasila.²⁷

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan betapa terorisme, radikalisme, dan intoleransi merupakan ancaman bagi bangsa di Indonesia. Namun berbeda dengan aksi terorisme dan radikalisme yang cenderung berdimensi vertikal (terjadi antara kelompok tertentu yang hendak merongrong kewibawaan negara), fenomena intoleransi lebih bersifat horizontal (merebak di antara kelompok-kelompok masyarakat dengan latar belakang identitas yang berbeda, khususnya identitas keagamaan). Sebagai bangsa yang sangat majemuk, Indonesia memang senantiasa diliputi kerentanan akan konflik sosial. Oleh karena itu, fenomena intoleransi senantiasa menjadi ancaman bagi kesadaran berbangsa masyarakat Indonesia karena dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Sebagai contoh, kasus intoleransi berupa penolakan pendirian rumah ibadah di beberapa daerah di Indonesia. seperti penolakan pembangunan pura di Desa Sukaurip, Kabupaten Bekasi, pada 2015 dan gereja GKJ di Kota Bogor pada 2012,²⁸ ataupun penolakan pembangunan masjid di Manokwari pada 2015²⁹ dan di Parepare pada 2019.³⁰

Pada dasarnya, intoleransi dapat dimaknai sebagai kecenderungan untuk tidak bisa menerima keberadaan orang-orang/kelompok lain yang berbeda identitas dengannya, khususnya identitas primordial seperti suku bangsa dan agama. Dalam kaitannya dengan kemajemukan identitas beragama, intoleransi akan menumbuhkan perasaan seseorang bahwa agama/keyakinannya merupakan satu-satunya kebenaran, sehingga agama/keyakinan yang lain tidak sepatutnya ada. Jika dicermati, kecenderungan semacam ini sama sekali bertentangan dengan semangat

²⁷ “800.000 PNS Anti_Pancasila dan Anti-NKRI,” *Solopos.com* (29 November 2019), diakses dari <https://www.solopos.com/800-000-pns-anti-pancasila-dan-anti-nkri-1033743>, 10 Juni 2020.

²⁸ Desi Purnamasari, “Problem Umat Agama Minoritas: Susah Mendirikan Rumah Ibadah,” *Tirto.id* (16 Mei 2019), diakses dari <https://tirto.id/problem-umat-agama-minoritas-susah-mendirikan-rumah-ibadah-dJeE>, pada 12 Juni 2020.

²⁹ Mawa Kresna, “Perda Manokwari Kota Injil: Demo Menolak Pembangunan Masjid,” *Tirto.id* (8 Januari 2019), diakses dari <https://tirto.id/perda-manokwari-kota-injil-demo-menolak-pembangunan-masjid-ddsl>, pada 12 Juni 2020.

³⁰ Andi Fardi, “Sejumlah Warga Parepare Tolak Pembangunan Masjid di Lumpue,” *Sulselsatu.com* (26 September 2019), diakses dari <https://www.sulselsatu.com/2019/09/26/sulsel/ajattapareng/sejumlah-warga-parepare-tolak-pembangunan-masjid-di-lumpue.html>, pada 12 Juni 2020.

kesadaran berbangsa yang berakar pada pemahaman bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya sudah senantiasa majemuk.

Di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, bersamaan dengan proses demokratisasi pasca-Reformasi tahun 1998, ranah publik merupakan ranah terbuka yang dapat menjadi lahan subur bagi persemaian dan sirkulasi ide-ide dan gagasan-gagasan yang dapat mengarahkan pola pikir generasi muda bangsa pada intoleransi. Generasi muda menjadi sasaran utama persebaran ide-ide intoleran karena saat ini ranah publik yang utama salah satunya berada di ruang siber, dalam mana generasi muda menghabiskan banyak waktu untuk melakukan interaksi sosial. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta pada tahun 2017 menunjukkan bahwa peningkatan intoleransi pada generasi milenial Indonesia banyak dipengaruhi oleh internet. Berdasarkan hasil survei tersebut juga dijumpai bahwa sebanyak 54,37% pelajar di Indonesia mempelajari pengetahuan tentang agama dari internet.³¹

Berangkat dari kewaspadaan akan berkembangnya fenomena intoleransi di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini, Kementerian Agama RI pun menggalakkan suatu konsep yang disebut moderasi beragama. Di dalam buku *Moderasi Beragama*, mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin mengungkapkan bahwa moderasi beragama merupakan “komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna” dalam kehidupan bermasyarakat yang diwarnai kemajemukan suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politik.³² Dengan kata lain, konsep moderasi beragama merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dalam konteks antisipasi terhadap ancaman intoleransi.

b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara pada Dimensi Kesadaran Bernegara

Dalam konteks kesadaran bernegara, ancaman atau tantangan utama yang hadir saat ini muncul bersamaan dengan perubahan fundamental dalam kehidupan berpolitik dan bernegara bangsa Indonesia pasca-Reformasi tahun

³¹ Balitbang-Diklat Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Hal. 90.

³² Balitbang-Diklat Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Hal. v.

1998. Salah satu agenda utama Reformasi 1998 adalah pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, sebagai implementasi dari transformasi struktur politik dari yang sebelumnya terpusat pada suatu “negara kuat” (*strong state*) selama masa Orde Baru menjadi lebih demokratis. Dengan otonomi daerah, terjadi pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, baik secara politik maupun ekonomi, sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara adil dan merata di semua daerah, tidak terpusat pada daerah tertentu atau pada ibu kota negara saja.³³ Adapun dengan desentralisasi, terjadi pembagian kekuasaan baik di antara cabang-cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun di antara lembaga-lembaga pemerintahan pada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda (nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota) sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu orang atau satu lembaga saja. Setidaknya terdapat dua tujuan utama yang hendak dicapai melalui implementasi otonomi daerah dan desentralisasi, yakni mendekatkan lembaga pemerintahan dengan masyarakatnya, terutama di daerah, serta mencegah pemusatan kekuasaan yang berpotensi menimbulkan korupsi sistemik, bahkan melahirkan penguasa otoriter.³⁴

Generasi muda bangsa saat ini merupakan generasi yang tumbuh dewasa di era demokratisasi pasca-Reformasi 1998 ini. Kendati demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa struktur politik dan pemerintahan yang ada masih didominasi oleh para elite dari generasi sebelumnya.³⁵ Permasalahan terkait kehidupan bernegara dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, salah satunya adalah masih merajalelanya korupsi. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, korupsi perlu dipandang bukan sebagai salah satu penyebab, melainkan akibat dari sistem demokrasi yang masih memiliki kelemahan-kelemahan hingga saat ini. Dengan kata lain, korupsi merupakan gejala dari implementasi demokrasi politik yang belum

³³ Septi Nur Wijayanti, “Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, No. 2 (2016), hal. 187. Lihat juga J. R. Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: PolGov UGM, 2012).

³⁴ *Ibid.*, Wijayanti.

³⁵ *Op Cit.*, Irham.

berjalan sebagaimana seharusnya, di mana sistem perpolitikan yang kurang sehat pada akhirnya mendorong terjadinya praktik-praktik korupsi.

Berdasarkan berbagai literatur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menyebabkan merajalelanya korupsi politik yang sangat sulit dihilangkan. Permasalahan pertama adalah politik berbiaya mahal. Partai-partai politik, sebagai kendaraan utama dalam mengisi jabatan-jabatan publik pengambil keputusan, masih dihadapkan dengan besarnya biaya politik, mulai dari biaya operasional hingga biaya kampanye. Akibatnya, politik berbiaya mahal ini cenderung mendorong partai-partai politik untuk berubah menjadi organisasi atau lembaga yang berorientasi pada penggalangan sumber daya dan keuntungan.³⁶

Permasalahan kedua, kaderisasi parpol yang digantikan oleh politik transaksional. Partai-partai politik, dalam mengajukan calon-calon anggota legislatif pada saat pemilihan umum legislatif (pileg), calon-calon presiden dan wakil presiden pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), maupun calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada), cenderung merekrut para kandidat yang berasal bukan dari mekanisme kaderisasi internal partai politik itu sendiri, melainkan berasal dari luar partai. Para kandidat tersebut biasanya diajukan atas dasar pertimbangan popularitas atau bahkan pada besarnya sumber daya (ekonomi dan jejaring sosial) yang mampu dikontribusikan kepada partai oleh kandidat tersebut.³⁷

Permasalahan ketiga, penegakan hukum yang dipandang masih lemah, khususnya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Di satu sisi, para terpidana kasus korupsi kerap kali hanya mendapatkan hukuman ringan atau hukuman minimal. Selain itu, tidak jarang terjadi bahwa pengembalian uang negara yang telah dikorupsi mengalami banyak kendala dan tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Di sisi lain, dari waktu ke waktu kerap terjadi perubahan kebijakan atau wacana perubahan kebijakan terkait keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipandang dapat

³⁶ Marcus Mietzner, "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption," *Contemporary Southeast Asia* Vol. 29 No. 2 (2007), hal. 238-263.

³⁷ M. Aqil Irham, "Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* (2016).

memperlemah lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Hal ini, misalnya terjadi ketika muncul kontroversi “Cicak vs Buaya” pada 2009 ketika KPK bersitegang dengan Kabareskrim Polri pada waktu itu, Susno Duadji,³⁸ kontroversi “KPK vs Polri” pada 2015 ketika KPK menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi,³⁹ atau ketika muncul kontroversi terkait rencana revisi UU KPK pada 2019.⁴⁰

Permasalahan keempat, edukasi politik yang belum berjalan secara efektif. Edukasi politik merupakan tanggung jawab bersama segenap elemen bangsa, khususnya para pemimpin politik nasional. Edukasi politik juga menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab utama partai-partai politik. Melalui edukasi politik diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan uraian pada pasal sebelumnya, terdapat beberapa faktor penyebab yang memengaruhi rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara generasi muda Indonesia. Di antara faktor-faktor tersebut adalah merebaknya intoleransi yang mengancam keharmonisan hidup bermasyarakat di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang. Selain itu, dalam konteks kehidupan berdemokrasi saat ini, faktor yang mengemuka salah satunya adalah korupsi politik yang merajalela. Tak dapat dimungkiri, faktor penyebab di atas bekerja dalam konteks situasi zaman saat ini yang dibentuk oleh Revolusi Industri 4.0, serta karakteristik pemuda dari generasi Y (milenial) dan Z yang telah hidup dalam lingkungan siber-fisik sebagai “habitat” mereka. Sikap dan perilaku intoleransi banyak menyebar dan diperbincangkan di media sosial. Partisipasi generasi muda dalam kehidupan berpolitik juga banyak terekspresikan melalui

³⁸ A. S. Rimbawana, “Sejarah Upaya Pelemanahan KPK: Dari Cicak vs Buaya hingga Teror,” *Tirto.id* (2 September 2019), <https://tirto.id/sejarah-upaya-pelemanahan-kpk-dari-cicak-vs-buaya-hingga-teror-eho9>, diakses 18 April 2020.

³⁹ BBC Indonesia, “Kronologi Kasus Budi Gunawan dan Ketegangan KPK-Polri,” *BBC Indonesia* (16 Februari 2015), https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk, diakses 18 April 2020.

⁴⁰ Ardito Ramadhan, “Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan KPK,” *Kompas.com* (25 September 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk>, diakses 18 April 2020.

media sosial. Terutama dalam masa-masa pemilu, pendapat dan ekspresi politik dapat dengan mudah ditemukan di media sosial. Pandangan-pandangan kritis dalam menyoroti kebijakan pemerintah juga acap dilontarkan melalui media sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara, serta faktor-faktor penyebab yang dapat melemahkan kesadaran ini, pada generasi muda saat ini tidak terlepas dari konteks zaman di era Revolusi Industri 4.0.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, terdapat dua konsep solusi yang coba ditawarkan, yakni *branding* bela negara dan penyelenggaraan pendidikan karakter dengan fokus pada peningkatan unsur kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan unsur kesadaran berbangsa dan bernegara, *branding* bela negara perlu diarahkan untuk membangun konsep bela negara yang dapat menggambarkan karakteristik Indonesia baik sebagai sebuah bangsa maupun negara. Salah satu konsep yang sangat dekat dengan bela negara adalah nasionalisme, bahkan keduanya sering diperlakukan sama atau serupa. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nasionalisme dapat diartikan sebagai “paham (ajaran) untuk mencintai bangsa sendiri; sifat kenasionalan” atau “kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.”⁴¹ Menurut pemahaman umum bangsa Indonesia, nasionalisme cenderung dimaknai sebagai sebuah paham atau kesadaran yang positif dan memiliki keutamaan. Namun jika dibandingkan, kata *nationalism* dalam bahasa Inggris justru cenderung berkonotasi negatif, yakni “*identification with one's own nation and support for its interest, especially to the exclusion or detriment of the interests of other nations*” (identifikasi kepada bangsa sendiri dan dukungan terhadap kepentingannya, khususnya dengan *mengeksklusi* atau *merugikan* kepentingan bangsa lain).⁴²

Dalam diskursus internasional, nasionalisme cenderung dimaknai sebagai bentuk sikap egois untuk mementingkan bangsa sendiri dan mengabaikan kerja sama yang saling menguntungkan antarbangsa. Namun dalam konteks Indonesia, khususnya terkait dengan sejarah pembentukan bangsa Indonesia, nasionalisme

⁴¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V* (Jakarta: Badan Bahasa Kemdikbud RI, 2016).

⁴² Oxford University, *Oxford English Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

justru cenderung dimaknai sebaliknya, yakni sebagai kecintaan terhadap negara-bangsa yang diwujudkan dengan mengatasi perbedaan suku-suku bangsa dan menunda kepentingan kelompok atau golongan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Mencermati perbedaan konotasi maupun latar belakang historis ini, maka perlulah kiranya bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan konsep bela negara yang dapat menggambarkan kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia, layaknya konsep *exceptionalism* bagi bangsa Amerika Serikat. Dalam teori *branding*, langkah ini akan berguna untuk membangun “asosiasi merek”⁴³ bela negara sehingga terlihat kekhasannya dibandingkan konsep-konsep lain yang memiliki kedekatan makna, seperti *nationalism* dan *exceptionalism*.

Langkah selanjutnya adalah penyelenggaraan pendidikan karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan karakter ini perlu menyertakan beberapa pokok pengetahuan. Pertama, pengetahuan tentang moderasi beragama yang digalakkan secara beriringan dengan pendidikan multikulturalisme, guna mereduksi fenomena intoleransi. Pendidikan multikulturalisme penting bagi moderasi beragama, karena memberikan dasar pemahaman tentang karakteristik bangsa Indonesia yang terbangun dari kemajemukan, sehingga watak tenggang rasa sudah menjadi kewajaran pada kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini juga penting untuk mencegah berkembangnya politik identitas yang berpotensi mengakibatkan disintegrasi sosial. Kementerian Agama dan lembaga terkait lainnya dapat berperan sebagai *leading sector* dalam pendidikan karakter yang mengajarkan moderasi beragama.

Selanjutnya, pengetahuan tentang partisipasi politik dan pemerintahan juga perlu diajarkan kepada generasi muda. Pengajaran ini perlu disertai dengan pemberian pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang korupsi politik. Harapannya, agar generasi muda yang di masa depan akan menjadi aktor-aktor utama dalam kancah politik dan pemerintahan, sedari dini memahami apa itu korupsi, bahayanya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, serta langkah-langkah untuk menghindari dan mencegahnya. Di lingkungan pendidikan,

⁴³ David A. Aaker, “The Value of Brand Equity,” *Journal of Business Strategy* Vol. 12 No. 4 (1992), hal. 27–32.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merumuskan materi pembelajaran terkait korupsi politik yang pada praktiknya dapat diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau Ilmu Pengetahuan Sosial.

15. Kesadaran Bela Negara Ditinjau dari Unsur Keyakinan pada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Menurut Moh. Yamin, kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta *panca* yang berarti lima dan *syila* yang berarti batu sendi, alas, atau dasar.⁴⁴ Pancasila merupakan pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa, dasar negara, dan sekaligus ideologi nasional Indonesia.⁴⁵ Sebagai *Weltanschauung*, Pancasila bersumber dari pandangan hidup yang telah ada pada masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar konstitusional bagi Pembukaan UUD 1945 dan menjawab batang tubuh UUD 1945, sehingga segenap produk hukum dan kebijakan negara harus bersumber dan bermuara pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila merupakan dasar semangat bagi terwujudnya jati diri bangsa dan acuan bagi warga negara dalam menghadapi globalisasi dan ancaman ideologi lainnya.⁴⁶

Dalam kaitannya dengan Indeks Ketahanan Nasional (IKN), unsur keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara berkaitan erat dengan gatra ideologi serta gatra pertahanan dan keamanan. Dalam lima tahun terakhir, yakni sejak 2015 hingga 2019, perhitungan IKN menunjukkan bahwa skor IKN untuk gatra ideologi senantiasa berada pada kategori “kurang tangguh,” sekalipun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018. Sejak 2015 hingga 2019 skor untuk gatra ideologi berturut-turut adalah 2,23; 2,06; 2,06; 2,44; dan 2,44.⁴⁷ Berdasarkan hasil pengukuran IKN, selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2015 hingga 2019, skor untuk gatra pertahanan dan keamanan selalu berada pada kategori “cukup tangguh,” dengan nilai berturut-turut dari tahun ke tahun adalah 2,82; 3,08;

⁴⁴ Ditjen Pothan Kemhan RI, *Modul Bela Negara: Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara* (Jakarta: Ditjen Pothan Kemhan RI, 2016), hal. 5.

⁴⁵ *Ibid.*, *Modul Bela Negara: Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara*, hal. 12.

⁴⁶ *Ibid.*, *Modul Bela Negara: Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara*, hal. 12–13.

⁴⁷ Dadan U. Daihani, “Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS,” Paparan disampaikan pada *Lokakarya Bela Negara Wantannas RI*, 2019.

3,08; 2,79; dan 2,75.⁴⁸ Kendati demikian, seperti terlihat dari hasil pengukuran tersebut, skor pada tiga tahun terakhir cenderung menunjukkan penurunan, sehingga patut diwaspada dan mendapatkan perhatian.

Selain dari IKN, sebagaimana terlihat pada penjelasan di atas, kondisi kesadaran bela negara terkait unsur keyakinan pada Pancasila juga dapat kita cermati dari data lain yang disediakan oleh hasil survei dari lembaga-lembaga di kalangan masyarakat sipil, salah satunya survei lima tahunan yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) untuk mengukur seberapa tinggi tingkat dukungan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut hasil survei LSI, pada tahun 2005 jumlah pendukung Pancasila sebesar 86%. Angka ini mengalami tren penurun pada periode-periode berikutnya, di mana pada tahun 2010 hanya mencapai 81,7% dan 75,3% pada tahun 2015.⁴⁹ Sayangnya, belum ada data yang tersedia untuk periode tahun 2020. Namun demikian, kita tidak boleh menutup diri dari kemungkinan bahwa tren penurunan jumlah pendukung Pancasila akan tetap terjadi pada tahun 2020. Kemudian, hasil survei Alvara Research Center pada 2016 menunjukkan bahwa jumlah responden yang secara yakin memilih Pancasila sebagai ideologi negara tidak sampai separuh dari jumlah sampel. Hanya sebanyak 45,4% responden yang masih memilih Pancasila sebagai ideologi negara, sebanyak 15,7% cenderung memilih Islam, sedangkan sebanyak 38,9% sisanya ragu-ragu memilih Pancasila atau Islam sebagai ideologi negara.⁵⁰ Apa yang ditunjukkan oleh hasil survei LSI dan Alvara Research Center patut mendapatkan perhatian, dan perlu disikapi lebih sebagai gejala, sehingga faktor penyebab yang ada di balik gejala tersebut masih harus diselidiki lebih lanjut.

Untuk maksud yang terakhir inilah perlu kiranya menilik berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan (ATGH) yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat ketangguhan unsur keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum penulis mencoba mengidentifikasi ATGH yang menjadi faktor penyebab tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami

⁴⁸ *Ibid.*, Daihani.

⁴⁹ Mokhamad Munib, "DPR Prihatin akan Terus Turunnya Nilai-Nilai Kebangsaan," *SenayanPost.com* (29 Agustus 2018), <https://www.senayanpost.com/dpr-prihatin-akan-terus-turunnya-nilai-nilai-kebangsaan/>, diakses 21 Maret 2020.

⁵⁰ Hasanuddin Ali, "Ideologi Negara: Pancasila atau Islam?" *Alvara-Strategic.com* (10 January 2018).

bahwa keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara harus didasarkan pada penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, sehingga bentuk-bentuk ATGH yang muncul pun akan terkait dengan tiap-tiap nilai yang dimaksud. Sebagaimana terkandung dalam masing-masing sila, nilai-nilai Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kesemua nilai ini merupakan nilai-nilai dasar yang universal dan bersifat tetap.⁵¹

a. Yakin pada Pancasila pada Dimensi Nilai Ketuhanan

Pertama, kesadaran akan nilai ketuhanan. Dalam pengeja-wantahannya, kesadaran akan nilai ketuhanan mencakup ketakwaan personal berupa ketundukan dan keyakinan yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ketakwaan sosial yang diwujudkan melalui komitmen etis dalam menyelenggarakan kehidupan publik politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur.⁵² Dengan demikian, dalam kehidupan bermasyarakat, nilai ketuhanan ini akan terejawantahkan melalui sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antarumat beragama. Sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati tersebut bersumber dari ketiaatan terhadap Tuhan (ketakwaan personal) yang kemudian mewarnai hubungan antarmanusia (ketakwaan sosial), mengingat semua agama yang dianut oleh bangsa Indonesia mengajarkan untuk menghargai umat agama lain. Praktik beragama seperti inilah yang kiranya sesuai dengan gagasan Ir. Soekarno untuk beragama dan berketuhanan secara “berkebudayaan” dan “berkeadaban.”⁵³ Namun demikian, dinamika kehidupan bermasyarakat di era Revolusi Industri 4.0 telah pula membawakan bentuk-bentuk ATGH tertentu terhadap praktik beragama yang inklusif dan toleran.

Terkait nilai ketuhanan, salah satu bentuk ATGH utama yang secara nyata menyerang keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara adalah radikalisme berbasis kepercayaan keagamaan. Radikalisme memiliki dimensi yang mengarah pada konflik vertikal, karena cenderung membawa serta ideologi tandingan yang bermaksud menggantikan ideologi negara,

⁵¹ *Ibid., Modul Bela Negara: Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara*, hal. 8.

⁵² *Ibid., Modul Bela Negara: Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara*, hal. 15–16.

⁵³ *Op Cit.*, Gonggong, Hal. 9.

Pancasila. Sebagai contoh, ketika muncul kelompok teroris *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Timur Tengah, sebagian gagasan dan pandangan mereka telah menginspirasi munculnya kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia. Kelompok-kelompok ini cenderung menafikan karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk dengan mempromosikan pandangannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Dalam beberapa kasus, radikalisme semacam ini kemudian berujung pada aksi-aksi terorisme, misalnya yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) pada awal dekade 2000-an maupun Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berbaiat kepada ISIS pada tahun 2018. Demikian halnya dengan keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang meskipun tidak sampai melakukan aksi-aksi kekerasan fisik, namun memperjuangkan kekhilafahan sebagai bentuk negara pengganti NKRI.

b. Yakin pada Pancasila pada Dimensi Nilai Kemanusiaan

Kedua, kesadaran akan nilai kemanusiaan, mencakup penghargaan terhadap kemanusiaan serta kesadaran akan keadilan dan keadaban.⁵⁴ Nilai ini merupakan dasar pandangan bangsa Indonesia dalam menjunjung hak-hak asasi manusia. Sebagai bangsa yang religius, penghargaan terhadap hak asasi harus dijewali oleh kesadaran akan adanya kesetaraan di antara sesama manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua agama pun mengajarkan tidak ada diskriminasi dan pembedaan terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan ras, suku bangsa, maupun status sosial-ekonomi. Oleh karena di hadapan Tuhan, derajat manusia hanya ditentukan oleh kualitas moralnya.

Yang patut dicermati, dewasa ini telah berkembang wacana-wacana terkait hak-hak asasi manusia yang sebenarnya bersumber dari ideologi tertentu yang sejatinya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Misalnya, wacana yang mempromosikan dukungan terhadap homoseksualitas dan perilaku seksual lainnya yang tidak wajar (*lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer* atau LGBTQ), yang didasarkan pada

⁵⁴ *Ibid.*, Modul Bela Negara: *Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara*, hal. 17–18.

ideologi liberal. Wacana LGBTQ yang pada awalnya berkembang di negara-negara Barat, telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan perantaraan internet dan media sosial sebagai salah satu wahana utama penyebarannya. Oleh karena penyebaran wacana-wacana semacam itu, saat ini isu terkait LGBTQ telah pula marak diperbincangkan di Indonesia.

Dalam penyebarannya, gagasan-gagasan yang mendukung, bahkan mempromosikan, LGBTQ senantiasa mengatasnamakan hak asasi manusia sebagai pemberian. Namun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa gagasan yang bersumber dari paham liberalisme ini sebenarnya tidak bersifat universal, mengingat tidak semua kebudayaan menerimanya sebagai kenormalan, terlebih sebagai hak asasi manusia. Demikian halnya kebudayaan dan kepribadian masyarakat Indonesia. Perlu disadari bersama bahwa LGBTQ bukanlah sesuatu yang kodrat, melainkan konstruksi sosial. Dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, kehidupan keluarga masih menjadi unit sosial primer yang akan menentukan kualitas kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, gagasan LGBTQ cenderung membawa pada perubahan drastis dalam ikatan-ikatan sosial di dalam sebuah keluarga yang berpotensi merusak pranata keluarga yang secara tradisional telah membangun kehidupan masyarakat Indonesia selama beratus-ratus tahun, misalnya dengan mempromosikan pernikahan sesama jenis. Oleh karena itu, setiap gagasan yang mengatasnamakan hak asasi manusia tetap perlu disikapi secara kritis.

c. Yakin pada Pancasila pada Dimensi Nilai Persatuan

Ketiga, kesadaran akan nilai persatuan, yang mencakup kesadaran akan persatuan Indonesia, kecintaan pada Indonesia, dan gotong-royong.⁵⁵ Terkait dengan nilai persatuan, salah satu bentuk ATGH utama yang harus dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini lebih merupakan akibat dari adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang menunggangi proses demokratisasi yang berjalan intensif sejak Reformasi 1998. Sebagai bagian dari agenda demokratisasi pasca-Reformasi 1998, setidaknya terdapat dua perubahan fundamental yang mewarnai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

⁵⁵ *Ibid.*, Modul Bela Negara: *Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara*, hal. 19–20.

dan bernegara di Indonesia, yakni perubahan dari sentralisme negara menjadi otonomi daerah dan desentralisasi, serta perubahan dari demokrasi perwakilan selama masa Orde Baru menjadi demokrasi langsung.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah dan desentralisasi masih diwarnai oleh merajalelanya praktik korupsi politik. Hal ini telah disinggung pada pasal sebelumnya. Namun dalam kaitannya dengan ATGH terhadap nilai persatuan, yang perlu dicermati adalah bahwa merebaknya korupsi politik telah secara signifikan menurunkan kewibawaan pemerintah di mata rakyat dan sekaligus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Di sisi lain, pelaksanaan pemilihan umum secara langsung yang telah menjadi agenda politik rutin, baik di tingkat nasional maupun daerah, tidak jarang diwarnai oleh perbedaan opini dan sikap politik yang tajam di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tak jarang sampai memicu konflik baik antarindividu maupun antarkelompok. Melalui internet dan berbagai media sosial, isu-isu maupun *hoax* yang disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kerap memicu eskalasi perbedaan opini dan sikap politik menjadi konflik dan perpecahan. Kurangnya kedewasaan dalam kehidupan berpolitik ini, ditambah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dapat berujung pada melemahnya nilai persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang pada umumnya lebih vokal dalam mengutarakan sikap dan pandangan di ranah publik, terutama di media sosial.

d. Yakin pada Pancasila pada Dimensi Nilai Kerakyatan

Keempat, kesadaran akan nilai kerakyatan, mencakup musyawarah dan mufakat, serta dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan.⁵⁶ Jika nilai persatuan memberi kita orientasi dalam menyikapi perbedaan sikap dan pandangan, khususnya dalam kehidupan berpolitik, maka nilai kerakyatan memberi kita pedoman dalam mengatasi potensi-potensi konflik yang dapat muncul dari perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu ekspresi dari nilai kerakyatan ini adalah musyawarah untuk mufakat. Hal ini berarti bahwa setiap persoalan

⁵⁶ *Ibid.*, Modul Bela Negara: *Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara*, hal. 21–22.

yang memunculkan perbedaan sikap dan pandangan hendaknya diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah; bukan dengan memaksakan pendapatnya agar diterima oleh orang lain. Selain itu, dalam melaksanakan musyawarah hendaknya didasari pula dengan itikad untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

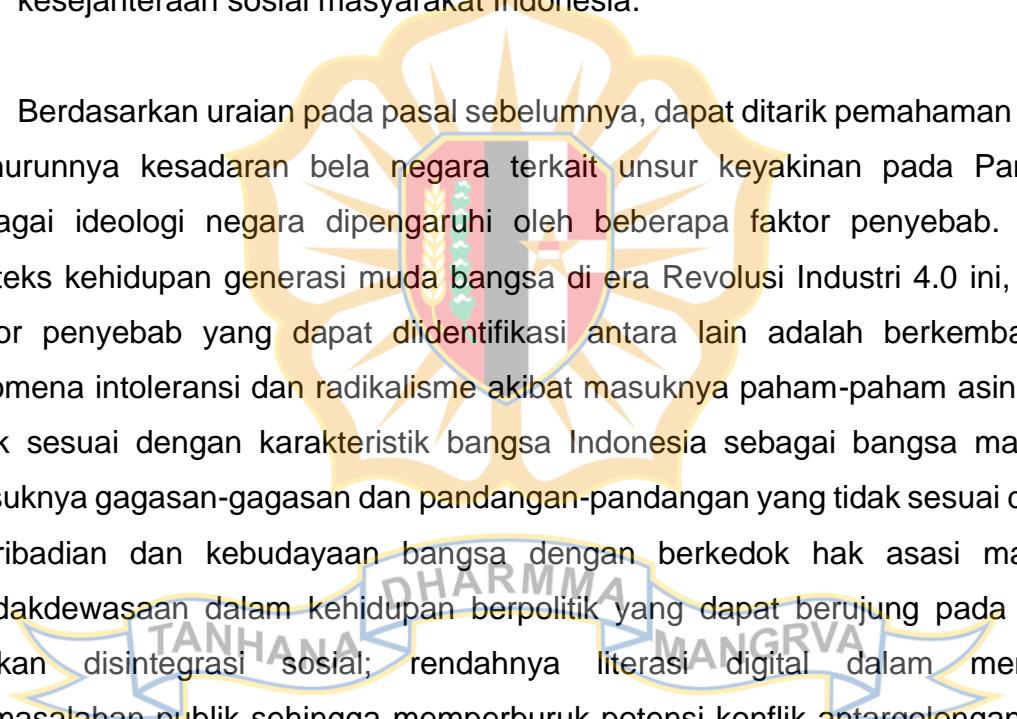
Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menghadirkan peluang yang luas bagi semua orang untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya internet dan media sosial, setiap orang juga berkesempatan untuk memperdengarkan pandangan dan gagasannya tentang suatu permasalahan yang bersifat publik secara leluasa. Namun demikian, diperlukan kecakapan, kecerdasan, dan kedewasaan baik dalam memilah-milah dan memanfaatkan informasi yang tersedia, maupun menyikapi dan mengutarakan pendapat terkait berbagai permasalahan yang bersirkulasi di ranah publik, khususnya permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Terlebih dengan berkembangnya fenomena *post-truth*,⁵⁷ di mana opini publik lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dan keyakinan pribadi dibandingkan oleh fakta objektif. Dalam kondisi semacam ini, ketika suatu permasalahan bersama menyeruak ke ranah publik, mekanisme musyawarah untuk mufakat sering kali terabaikan dalam pembahasan dan pencarian solusi untuk permasalahan tersebut. Yang ada kerap kali justru “debat kusir” dan saling cela.

Dalam konteks inilah literasi digital diperlukan dan menjadi sangat penting. Dengan adanya literasi digital, masyarakat akan dapat mengambil manfaat yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi dan menghindari mudaratnya. Dengan demikian, fasilitasi teknologi yang dihadirkan oleh Revolusi Industri 4.0 akan dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan musyawarah untuk mufakat dalam menghadapi masalah bersama di ruang publik. Hingga saat ini, literasi digital yang rendah masih menjadi tantangan dan hambatan tersendiri dalam menyikapi kemunculan suatu permasalahan bersama di ranah publik.

⁵⁷ Eddy Cahyono, “Media Sosial, Post Truth dan Literasi Digital,” *KSP.go.id*, diakses dari <http://ksp.go.id/media-sosial-post-truth-dan-literasi-digital/>, 27 April 2020.

e. Yakin pada Pancasila pada Dimensi Nilai Keadilan Sosial

Terakhir, kesadaran akan nilai keadilan sosial, mencakup pengakuan atas hak hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta keadilan sosial.⁵⁸ Nilai keadilan harus diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan, baik materil maupun imateril, yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Salah satu bentuk ATGH yang muncul dewasa ini terkait dengan nilai keadilan sosial adalah berkembangnya kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan yang menunggangi proses-proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (konflik kepentingan). Situasi semacam ini berpotensi memunculkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akibatnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.



Berdasarkan uraian pada pasal sebelumnya, dapat ditarik pemahaman bahwa menurunnya kesadaran bela negara terkait unsur keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Dalam konteks kehidupan generasi muda bangsa di era Revolusi Industri 4.0 ini, faktor-faktor penyebab yang dapat diidentifikasi antara lain adalah berkembangnya fenomena intoleransi dan radikalisme akibat masuknya paham-paham asing yang tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk; masuknya gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa dengan berkedok hak asasi manusia; ketidakdewasaan dalam kehidupan berpolitik yang dapat berujung pada konflik bahkan disintegrasi sosial; rendahnya literasi digital dalam menyikapi permasalahan publik sehingga memperburuk potensi konflik antargolongan; serta mengemukanya individualisme dalam bentuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang mencemari proses-proses pengambilan kebijakan publik.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, terdapat dua konsep solusi yang coba ditawarkan, yakni *branding* bela negara dan penyelenggaraan pendidikan karakter dengan fokus pada peningkatan unsur keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Mengingat sentralnya kedudukan Pancasila dalam diskursus bela negara,

⁵⁸ *Ibid.*, Modul Bela Negara: Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, hal. 22–24.

maka penting pula untuk melakukan *branding* terhadap Pancasila. Dalam hal ini, *branding* tersebut harus diarahkan untuk menghadirkan wajah Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka. Menurut Herdiawanto dkk., ideologi terbuka memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, "nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri." Kedua, "dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut." Ketiga, "nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional."⁵⁹

Upaya *branding* Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan langkah penting, mengingat pada masa Orde Baru Pancasila pernah ditafsirkan secara subjektif dan tertutup oleh penguasa sehingga rakyat tidak begitu mengindahkan ideologi Pancasila,⁶⁰ dan bahkan pada era pasca-Reformasi berkembang pandangan bahwa Pancasila hanyalah alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Oleh karena itu, pada era demokratisasi dan keterbukaan saat ini, agar dapat diterima oleh generasi muda, Pancasila pun perlu di-*branding* sebagai ideologi terbuka dan bukan alat kekuasaan belaka. Upaya *branding* perlu juga dilakukan dengan memberikan insentif pada inisiatif-inisiatif yang datang dari kalangan masyarakat sendiri untuk menumbuhkan keyakinan pada Pancasila. Misalnya, rekor pembacaan teks Pancasila serentak oleh 37.449 orang di Boyolali, Jateng, pada 25 Agustus 2019;⁶¹ serta rekor *yel-yel* dan pantomim bertemakan "Pancasila Jiwa Kita" oleh 8.639 mahasiswa UNS pada 18 Agustus 2019 di Surakarta, Jateng.⁶² Dengan mendorong upaya-upaya *bottom up* semacam ini, diharapkan pendidikan Pancasila pun akan terhindar dari kecenderungan penyalahgunaan Pancasila untuk tujuan melanggengkan kekuasaan oleh rezim yang tengah memerintah.

⁵⁹ H. Herdiawanto, F. F. Wasitaatmadja, J. Hamdayama, *Spiritualisme Pancasila* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 2.

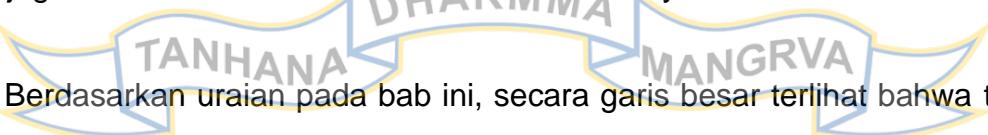
⁶⁰ *Ibid.*, Herdiawanto dkk., hal. 5.

⁶¹ Ragil Ajiyanto, "Bikin Merinding, 37.449 Orang Serempak Baca Teks Pancasila di Boyolali," *Detik.com* (25 Agustus 2019), diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4679974/bikin-merinding-37449-orang-serempak-baca-teks-pancasila-di-boyolali>, 10 Juni 2020.

⁶² Citra Larasati, "Student Vaganza' UNS Raih Rekor Indonesia Leprid," *Medcom.id* (17 Agustus 2019), diakses dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/MkMVD4mK-student-vaganza-uns-raih-rekor-indonesia-leprid>, 10 Juni 2020.

Setelah upaya *branding* bela negara dapat diwujudkan secara efektif, diharapkan upaya peningkatan kesadaran bela negara pun dapat dilakukan secara efektif pula, karena ketertarikan dan kesediaan generasi muda untuk memperdalam dan mengimplementasikan konsep bela negara telah dapat ditumbuhkan. Bahkan, dalam perspektif teori *branding*, tidak mustahil upaya *branding* ini akan menghasilkan pula “loyalitas merek”⁶³ sehingga generasi muda akan lebih memprioritaskan Pancasila dibandingkan macam-macam ideologi lain yang wacananya bersirkulasi melalui internet dan media sosial.

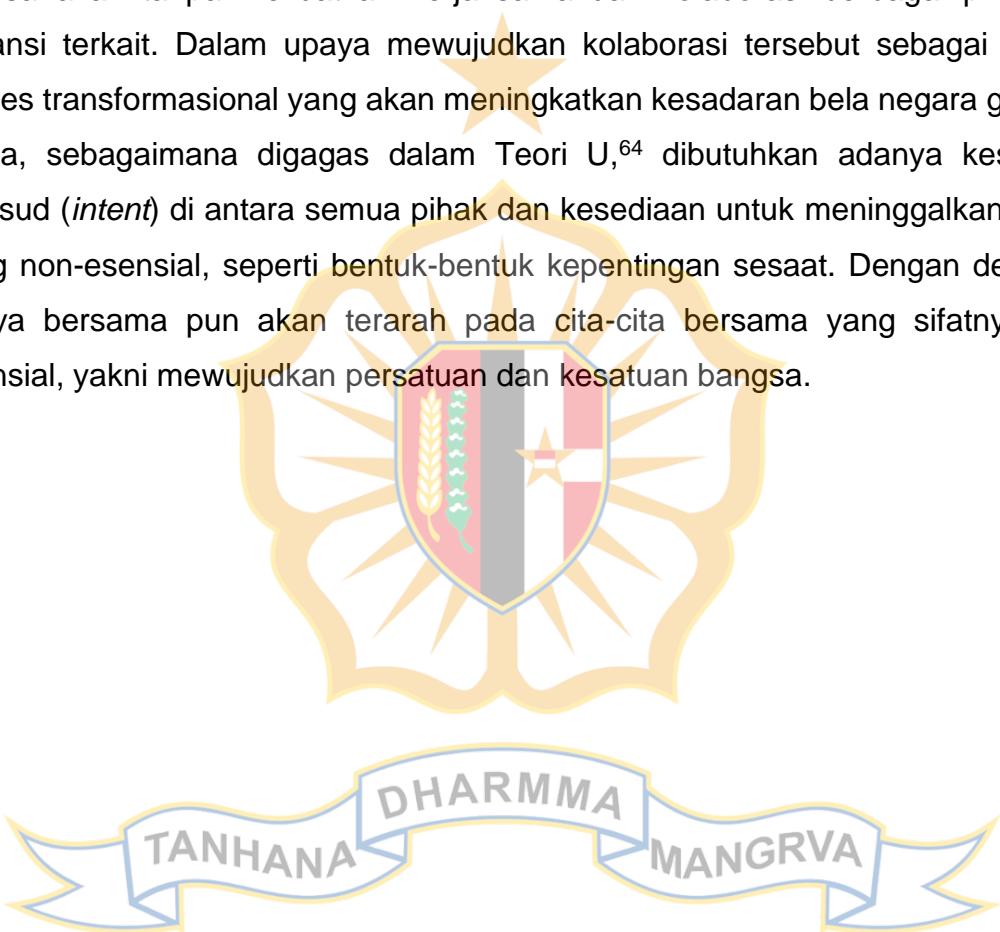
Langkah selanjutnya adalah pendidikan karakter untuk meningkatkan keyakinan generasi muda bangsa pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pendidikan karakter ini harus dapat mempromosikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual, sehingga relevan sebagai pedoman dalam menyikapi isu-isu kekinian yang berkembang, seperti radikalisme, susunan ideologi asing secara sembunyi-sembunyi, serta fenomena *post-truth*. Tentu saja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga negara yang dapat berperan sebagai *leading sector* dalam merealisasikan upaya ini. Kemudian, mengingat masifnya penggunaan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari generasi muda, maka di satu sisi, berbagai diskursus tentang nilai-nilai Pancasila dapat didiseminasi dengan memanfaatkan teknologi ini; dan di sisi lain, literasi digital pun perlu ditingkatkan agar generasi muda dapat lebih kritis dalam menghadapi dan menyikapi berbagai gagasan ideologis yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila yang juga secara luas bersirkulasi melalui dunia maya.



Berdasarkan uraian pada bab ini, secara garis besar terlihat bahwa terdapat dua bentuk upaya yang ditawarkan berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor penyebab menurunnya kesadaran bela negara pada unsur cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua bentuk upaya tersebut adalah *branding* bela negara dan pendidikan karakter yang berorientasi pada reduksi faktor-faktor penyebab menurunnya kesadaran bela negara generasi muda bangsa di era Revolusi Industri 4.0. Berbagai faktor yang diidentifikasi pada tabel di atas pada akhirnya berujung

⁶³ David A. Aaker, “The Value of Brand Equity,” *Journal of Business Strategy* Vol. 12 No. 4 (1992), hal. 27–32.

pada ancaman disintegrasi bangsa, baik secara sosial di mana kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda saling berkonflik (horizontal) maupun secara politik di mana kelompok-kelompok tertentu berusaha memisahkan diri dari Indonesia atau bahkan menggagalkan bentuk kesatuan negara Indonesia (vertikal). Dengan mereduksi faktor-faktor penyebab tersebut, diharapkan kesadaran bela negara dapat ditingkatkan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diperkuat. Dalam praktiknya, upaya-upaya yang ditawarkan ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa melibatkan kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak dan instansi terkait. Dalam upaya mewujudkan kolaborasi tersebut sebagai sebuah proses transformasional yang akan meningkatkan kesadaran bela negara generasi muda, sebagaimana digagas dalam Teori U,⁶⁴ dibutuhkan adanya kesamaan maksud (*intent*) di antara semua pihak dan kesediaan untuk meninggalkan hal-hal yang non-esensial, seperti bentuk-bentuk kepentingan sesaat. Dengan demikian, upaya bersama pun akan terarah pada cita-cita bersama yang sifatnya lebih esensial, yakni mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.



⁶⁴ O. Scharmer, “Addressing the Blind Spot of Our Time: An Executive Summary of the New Book by Otto Scharmer *Theory U: Leading from the Future as It Emerges*,” *OttoScharmer.com*, diunduh dari <https://www.ottoscharmer.com/publications/executive-summaries>, pada 16 Juli 2020.

BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat di era revolusi industri 4.0, telah mempermudah persebaran informasi di tengah masyarakat. Di samping membawa pengaruh positif, sebagian informasi juga berpotensi menyebabkan konflik, bahkan disintegrasi sosial, khususnya informasi yang tidak benar (*hoax*). Hal ini juga dapat mengakibatkan pudarnya karakter generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia terutama berkaitan dengan kesadaran bela negara, sehingga dapat memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran bela negara generasi muda bangsa pada era Revolusi Industri 4.0 sehingga dapat lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk membahas permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan perspektif kepentingan nasional. Data-data sekunder dianalisis dengan menggunakan landasan teori dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari hasil analisis tersebut, ditemukan akar masalah dan cara mengatasinya sebagai berikut:

a. Kesadaran Bela Negara pada Unsur Cinta Tanah Air

Pada aspek tanah air fisik, penyebab utama rendahnya kesadaran bela negara adalah kurangnya pengetahuan generasi muda bangsa mengenai keterkaitan antara pemanasan global dengan kondisi lingkungan Indonesia. Adapun pada aspek tanah air formal, penyebabnya adalah ketimpangan pembangunan nasional, sehingga menimbulkan perasaan “ditinggalkan” pada masyarakat yang mengalami ketertinggalan, khususnya di daerah yang jauh dari pusat ekonomi dan perbatasan negara.

Untuk meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap tanah air, terdapat dua bentuk solusi utama yang ditawarkan. Pertama, *branding* bela negara pada unsur cinta tanah air untuk meningkatkan “kesadaran akan merek” (*brand awareness*) cinta tanah air. Mengingat betapa masifnya diskursus tentang pemanasan global dewasa ini, *branding* bela negara harus dapat mengaitkan konsep cinta tanah air dengan pentingnya pelestarian

lingkungan. Kedua, pendidikan karakter yang menitikberatkan arti penting pelestarian lingkungan dan pengenalan Nusantara dengan ragam kondisi geografis, sosiokultural, dan historisnya.

b. Kesadaran Bela Negara pada Unsur Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pada aspek kesadaran berbangsa, penyebab utama rendahnya kesadaran bela negara adalah intoleransi. Adapun pada aspek kesadaran bernegara, penyebab utamanya adalah merajalelanya korupsi politik.

Untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda bangsa, terdapat dua bentuk solusi utama yang ditawarkan. Pertama, *branding* bela negara untuk meningkatkan “asosiasi merek” (*brand association*) kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, diperlukan upaya mengonsepsikan bela negara khas Indonesia. Kedua, pendidikan karakter yang menitikberatkan pada moderasi beragama dan multikulturalisme, serta anti korupsi politik dan pencegahannya.

c. Kesadaran Bela Negara pada Unsur Keyakinan pada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Ditemukan beberapa akar permasalahan yang menyebabkan rendahnya keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pada aspek nilai ketuhanan, penyebab utama rendahnya kesadaran bela negara adalah merebaknya radikalisme dan terorisme. Pada aspek nilai kemanusiaan, penyebab utamanya adalah menyebarluasnya gagasan ideologi asing dengan kedekatannya manusia. Pada aspek nilai persatuan, penyebab utamanya adalah kurangnya kedewasaan dalam kehidupan berpolitik yang berpotensi memicu konflik sosial. Pada aspek nilai kerakyatan, penyebab utamanya adalah rendahnya literasi digital dalam menyikapi permasalahan di ranah publik. Adapun pada aspek nilai keadilan sosial, penyebab utamanya adalah masih adanya konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan publik.

Untuk meningkatkan keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara, terdapat dua bentuk solusi utama yang ditawarkan. Pertama, *branding* bela negara untuk meningkatkan “loyalitas merek” (*brand loyalty*) keyakinan pada Pancasila. Dengan adanya loyalitas merek, generasi muda akan dapat secara

mantap memilih Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain. Kedua, pendidikan karakter yang menitikberatkan pada relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menjalani kehidupan sosial di era Revolusi Industri 4.0.

17. Rekomendasi

- a. Untuk meningkatkan cinta tanah air fisik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menjadi *leading sector* dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang pemanasan global untuk menjaga kelestarian alam Indonesia.
- b. Untuk meningkatkan cinta tanah air formal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menjadi *leading sector* untuk meningkatkan pemerataan pembangunan nasional.
- c. Untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu bekerja sama dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan terkait dalam rangka mereduksi intoleransi antarumat beragama, radikalisme, dan penyebaran ideologi asing.
- d. Perang melawan terorisme dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak hanya dilakukan dengan konfrontasi militer, namun juga melalui ruang komunikasi yang meliputi ide, nilai, dan persepsi. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara perlu memviralkan kontra narasi yang lebih kuat. Demikian juga untuk menangkal hoax, Kemkominfo perlu melakukan literasi digital bagi masyarakat demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Pendidikan karakter untuk meningkatkan kesadaran bela negara perlu dimulai sejak dini, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan pendidikan. Secara formal, dapat dimulai dari jenjang pendidikan pra-sekolah (PAUD) sampai dengan perguruan tinggi. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk menanamkan nasionalisme Indonesia melalui pemahaman keberagaman dan toleransi, geografi Indonesia, sejarah perjuangan bangsa serta mencintai produksi dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, 2016).

Balitbang-Diklat Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Hal. 90.

Ditjen Pothan Kemhan RI, *Modul Bela Negara: Cinta Tanah Air* (Jakarta: Ditjen Pothan Kemhan RI, 2016), hal. 9.

Ditjen Pothan Kemhan RI, *Modul Bela Negara: Kesadaran Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Ditjen Pothan Kemhan RI, 2016), hal. 6.

Ditjen Pothan Kemhan RI, *Modul Bela Negara: Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara* (Jakarta: Ditjen Pothan Kemhan RI, 2016), hal. 5.

Herdiawanto, H., F. F. Wasitaatmadja, J. Hamdayama, *Spiritualisme Pancasila* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 2.

Irham, M. Aqil. *Demokrasi Muka Dua* (Jakarta: KPG, 2016), hal. 13.

Joesoef, Daoed. *Pikiran dan Gagasan Daoed Joesoef: 10 Wacana tentang Aneka Masalah Kehidupan Bersama* (Jakarta: Penerbit PT Kompas, 2011).

Kemhan RI, *Tataran Dasar Bela Negara* (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2010).

Lemhannas RI, *Modul Bidang Studi Konsensus Dasar Bangsa: Sub Bidang Studi NKRI* (Jakarta: Lemhannas RI, 2020), hal. 89.

Oxford University, *Oxford English Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

Jurnal Ilmiah dan Laporan Penelitian

Aaker, David A. "The Value of Brand Equity," *Journal of Business Strategy* Vol. 12 No. 4 (1992), hal. 27–32.

Balitbang Kemhan RI, "Litbang Penyelenggaraan PKBN di Daerah," *Laporan Penelitian* (Jakarta: Balitbang Kemhan RI, 2019).

Balitbang Kemhan RI, "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Perbatasan Indonesia–Malaysia di Pulau Kalimantan dalam rangka

Pertahanan Negara," *Laporan Penelitian* (Jakarta: Balitbang Kemhan RI, 2017).

Scharmer, O. "Addressing the Blind Spot of Our Time: An Executive Summary of the New Book by Otto Scharmer *Theory U: Leading from the Future as It Emerges,*" OttoScharmer.com, diunduh dari <https://www.ottoscharmer.com/publications/executive-summaries>, pada 16 Juli 2020.

Daihani, Dadan U. "Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS," Paparan disampaikan pada *Lokakarya Bela Negara Wantannas RI*, 2019.

Delima, Prisca. "Bela Negara dan Ketahanan Lingkungan Indonesia," *Wira Edisi Khusus 2017* (Jakarta: Kemhan RI), hal. 53.

German Initiative Curbing Corporate Power, "the Power of Corporations in the Digital World," *Discussion Paper* (Berlin: German Initiative Curbing Corporate Power, 2019), hal. 4.

Irham, M. Aqil. "Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* (2016).

Kaho, J. R. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: PolGov UGM, 2012).

Lee MinHwa et al., "How to Respond to the Fourth Industrial Revolution, or the Second Information Technology Revolution? Dynamic New Combinations between Technology, Market, and Society through Open Innovation" (*Journal of Open Innovation* vol. 4, no. 21, 2018).

Liao Yongxin et al., "The Impact of the Fourth Industrial Revolution: A Cross-Country/Region Comparison" (*Production* 28, 2018).

Mietzner, Marcus. "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption," *Contemporary Southeast Asia* Vol. 29 No. 2 (2007), hal. 238-263.

Satya, V. E. "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0" (*Info Singkat* vol. X, no. 09/I/Puslit/Mei/2018).

Schäfer, Matthias. "The Fourth Industrial Revolution: How the EU Can Lead It" (*European View* vol. 17, no. 1, 2018). Hal. 5–12.

Suriata, I Nengah. "Aktualisasi Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Muda dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* Vol. 4 No. 1 (2019), hal. 48.

Wijayanti, Septi Nur. "Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014" *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, No. 2 (2016), hal. 187.

Surat Kabar dan Internet

"800.000 PNS Anti_Pancasila dan Anti-NKRI," *Solopos.com* (29 November 2019), diakses dari <https://www.solopos.com/800-000-pns-anti-pancasila-dan-anti-nkri-1033743>, 10 Juni 2020.

Ajiyanto, Ragil. "Bikin Merinding, 37.449 Orang Serempak Baca Teks Pancasila di Boyolali," *Detik.com* (25 Agustus 2019), diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4679974/bikin-merinding-37449-orang-serempak-baca-teks-pancasila-di-boyolali>, 10 Juni 2020.

Akbar, Wishnugroho. "BIN Ungkap 39 % Mahasiswa Terpapar Radikalisme", *CNNIndonesia.com*, dalam <https://www.cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 21 Maret 2020.

Ali, Hasanuddin. "Ideologi Negara: Pancasila atau Islam?" *Alvara-Strategic.com* (10 January 2018).

Artika R., Putri. "Gubernur Kaltim Lapor Jokowi Ada 10 Desa Mau Gabung Malaysia," *Merdeka.com* (15 April 2015), diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-kaltim-lapor-jokowi-ada-10-desa-mau-gabung-malaysia.html> pada 8 Mei 2020.

BBC Indonesia, "Kronologi Kasus Budi Gunawan dan Ketegangan KPK-Polri," *BBC Indonesia* (16 Februari 2015), https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk, diakses 18 April 2020.

"BPIP-TNI Pulihkan Prajurit Terpapar Paham Anti-Pancasila," *Beritasatu.com* (23 Oktober 2019), diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/581382-bpiptni-pulihkan-prajurit-terpapar-paham-antipancasila>, 10 Juni 2020.

Cahyono, Eddy. "Media Sosial, Post Truth dan Literasi Digital," *KSP.go.id*, diakses dari <http://ksp.go.id/media-sosial-post-truth-dan-literasi-digital/>, 27 April 2020.

CNN Indonesia, "Relasi Indonesia–Malaysia, Serumpun Kadang Tak Rukun," *CNNIndonesia.com*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190828153113-106-425408/relasi-indonesia-malaysia-serumpun-kadang-tak-rukun/2>, 27 April 2020.

"Dihukum Nyanyi Lagu Wajib dan Sebutkan Nama Pahlawan, Sebagian Pelajar Tak Hafal," *NusaDaily.com* (20 Februari 2020), diakses dari <https://nusadaily.com/jatim/dihukum-nyanyi-lagu-wajib-dan-sebutkan-nama-pahlawan-sebagian-pelajar-tak-hafal.html>.

Fardi, Andi. "Sejumlah Warga Parepare Tolak Pembangunan Masjid di Lumpue," *Sulselsatu.com* (26 September 2019), diakses dari <https://www.sulselsatu.com/2019/09/26/sulsel/ajattapareng/sejumlah-warga-parapare-tolak-pembangunan-masjid-di-lumpue.html>, pada 12 Juni 2020.

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, "Tentang Kami," *dietkantongplastik.info*, diakses dari <https://dietkantongplastik.info/tentang-kami/> pada 7 Mei 2020.

Kresna, Mawa. "Perda Manokwari Kota Injil: Demo Menolak Pembangunan Masjid," *Tirto.id* (8 Januari 2019), diakses dari <https://tirto.id/perda-manokwari-kota-injil-demo-menolak-pembangunan-masjid-ddsl>, pada 12 Juni 2020.

Larasati, Citra. "'Student Vaganza' UNS Raih Rekor Indonesia Leprid," *Medcom.id* (17 Agustus 2019), diakses dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/MkMVD4mK-student-vaganza-uns-raih-rekor-indonesia-leprid>, 10 Juni 2020.

"Mantapkan Nilai Pancasila," *Kompas* (25 Juli 2017).

Munib, Mokhamad. "DPR Prihatin akan Terus Turunnya Nilai-Nilai Kebangsaan," *SenayanPost.com* (29 Agustus 2018), <https://www.senayanpost.com/dpr-prihatin-akan-terus-turunnya-nilai-nilai-kebangsaan/>, diakses 21 Maret 2020.

"Pelajar Bolos Dihukum Menyanyikan Indonesia Raya, Ternyata Tak Ada yang Hafal," *JPNN.com* (15 Januari 2020), diakses dari <https://www.jpnn.com/news/pelajar-bolos-dihukum-menyanyi-indonesia-raya-ternyata-tak-ada-yang-hafal>.

Permana, Erric. "LIPI: Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia Makin Parah," *AA.com.tr* (28 November 2018), diakses dari

<https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/lipi-kerusakan-terumbu-karang-di-indonesia-makin-parah/1323787> pada 6 Mei 2020.

Petrus, Ananias. "Selebaran Paham Khilafah Diedarkan Melalui Koran, Pasutri di Kupang Diamankan Polisi," *Merdeka.com* (30 Mei 2020), diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/selebaran-paham-khilafah-diedarkan-melalui-koran-pasutri-di-kupang-diamankan-polisi.html>, 10 Juni 2020.

Preuss, Shane. "Indonesia and Covid-19: What the World Is Missing," *The Diplomat* (24 April 2020), diakses dari <https://thediplomat.com/2020/04/indonesia-and-covid-19-what-the-world-is-missing/>, 27 April 2020.

Purnamasari, Desi. "Problem Umat Agama Minoritas: Susah Mendirikan Rumah Ibadah," *Tirto.id* (16 Mei 2019), diakses dari <https://tirto.id/problem-umat-agama-minoritas-susah-mendirikan-rumah-ibadah-dJeE>, pada 12 Juni 2020.

Putri, Intan W. K. "Platform Konservasi Lingkungan itu Bernama LindungiHutan," *Ecolify.org* (10 Maret 2020), diakses dari <https://ecolify.org/blog/lindungihutan-platform-konservasi-lingkungan> pada 7 Mei 2020.

Rahayu, Lisye Sri. "BNPT Bikin Survei, Hasilnya Potensi Radikalisme Menurun Tahun Ini," *Detik.com* (10 Desember 2019).

Ramadhan, Ardito. "Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan KPK," *Kompas.com* (25 September 2019), <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk>, diakses 18 April 2020.

Redaksi NU Online, "Radikalisme Yang Menyebar Secara Senyap Pada Remaja dan Pemuda," <https://www.nu.or.id/post/read/90645/radikalisme-yang-menyebar-sekara-senyap-pada-remaja-dan-pemuda>, diakses 21 Maret 2020

Renaldi, Adi. "Para Petani Urban di Jakarta Beri Bukti Kalian Bisa Bercocok Tanam di Lahan Apapun," *Vice.com* (6 Mei 2020), diakses dari https://www.vice.com/id_id/article/m7jq74/teknik-urban-farming-komunitas-indonesia-berkebun pada 7 Mei 2020.

Rimbawana, A. S. "Sejarah Upaya Pelemahan KPK: Dari Cicak vs Buaya hingga Teror," *Tirto.id* (2 September 2019), <https://tirto.id/sejarah-upaya-pelemahan-kpk-dari-cicak-vs-buaya-hingga-teror-eho9>, diakses 18 April 2020.

WWF, "Deforestasi," *WWF.or.id* (1 Mei 2009), diakses dari <https://www.wwf.or.id/?10741/Deforestasi>, pada 6 Mei 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

untuk Pertahanan Negara (UU PSDN).



RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Enjud Darojat
2. Pangkat/ Nrp : Kolonel Laut (E)/9861/P
3. Jabatan Terakhir : Pamen Sahli Sosbud Sahli Kasal
Mabesal
4. Tempat/Tgl Lahir : Cianjur, 13 Pebruari 1968
5. Alamat : Puri Kencana Karah Kav. C - 1 Surabaya
6. Agama : Islam



7. RIWAYAT KEPANGKATAN

- a. LETDA : 26 – 07 – 1990
- b. LETTU : 01 – 10 – 1993
- c. KAPTEN : 01 – 10 – 1996
- d. MAYOR : 01 – 10 – 2001
- e. LETKOL : 01 – 10 – 2006
- f. KOLONEL : 01 – 10 – 2011

8. RIWAYAT JABATAN

- a. Kodikal/Dpb/Perwira Siswa : 01 – 10 – 1990
- b. Armatim/Kapal : 01 – 08 – 1991
- c. Padiveka KRI TBT-516 Satfib Armatim : 08 – 10 – 1993
- d. Padiveka KRI TBT-516 Satfib Armatim : 03 – 09 – 1994
- e. Padiveka KRI SPT-923 Satban Armatim : 01 – 06 – 1995
- f. Dpb Denmako Armatim /Dik STTAL : 01 – 05 – 1997
- g. Bandya Sewaco Banharalut Slog Armatim : 01 – 02 – 2000
- h. Kasatkom Lant.VII Armabar : 15 – 10 – 2002
- i. Kasatkom Lant.III Armatim : 05 – 01 – 2005
- j. Dpb Denma Lant.III Armatim /Diksessoal : 01 – 02 – 2005
- k. Kasatharkan Diskomlek Koarmatim : 01 – 11 – 2005
- l. Pawas Sewaco Satgasbekda LPD DN Disadal : 02 – 10 – 2006

- m. Kasubdisren Dismatbek Koarmatim : 25 – 08 – 2008
- n. Kadeplek AAL : 08 – 11 – 2010
- o. Kadiskomlek Koarmatim : 16 – 01 – 2012
- p. Kasubdisdukkom Diskomlekal : 09 – 05 – 2014
- q. Pabanren Skomlek Mabes TNI : 24 – 06 – 2016
- r. Pamendik Sosbud Sahli Kasal Mabesal : 28 – 12 – 2018

9. RIWAYAT PENDIDIKAN

a. Umum

- 1) SD : TAHUN 1975 – 1981
- 2) SMP : TAHUN 1981 – 1984
- 3) SMA : TAHUN 1984 – 1987
- 4) S-2 UWIPA : TAHUN 2005 – 2007
- 5) S-2 UNHAN : TAHUN 2015 – 2019

b. Militer

- 1) AAL XXXVI/90 : 26 – 07 – 1990
- 2) Dikpasis Angk.-3 : 01 – 01 – 1991
- 3) Diklapa-1/Lekdalsen Angk-8 : 28 – 07 – 1994
- 4) STTAL/T.Eka Angk-18 : 01 – 02 – 2000
- 5) Seskoal Angk-43 : 27 – 10 – 2005
- 6) Sesko TNI Angk-42 : 14 – 12 – 2015

10.

- 
- a. BT. JALASENA NARARYA
 - b. SL. KESETIAAN VIII
 - c. SL. KESETIAAN XVI
 - d. SL. KESETIAAN XXIV
 - e. SL. WIRA NUSA
 - f. SL. WIRA DHARMA

11. KELUARGA

- A. Istri : Duhita Hayuningtyas, S.E., Ak., M.M.

- B. Anak : 1) Amira Jasmine Salsabila Darojat
2) Andhika Ditya Bagaskara Darojat
3) Aqilla Bilqis Khairunnisa Darojat

